



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

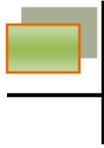
**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG**

(RENSTRA OPD)

TAHUN 2017 s/d 2021



TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021, disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Dinas Pertanian dan perkebunan selama tahun tersebut. Rencana Strategis ini memuat tentang visi, misi, proyeksi pertumbuhan, dan rencana strategis pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan di Kabupaten Sintang.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini kami ucapkan terima kasih.

Sintang, Juni 2017

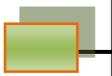
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang

Ir. VERONIKA ANCILI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630304199003 2 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya	31
2.3 Kinerja Pelayanan	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	43
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	58
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	60
4.1 Visi dan Misi	60
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	63
4.3 Strategi dan Kebijakan	64
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	72
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	86
BAB VII PENUTUP	89



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	31
2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	31
2.3	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	31
2.4	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang	32
2.5	Keadaan Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Menurut Status Tahun 2017	33
2.6	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	34
2.7	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang Ada Dilapangan	35
2.8	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Dioperasionalkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan	35
2.9	Sarana Pengendalian / Proteksi Tanaman	36
2.10	Sarana Infrastruktur Pertanian yg telah dibangun Sampai dengan Tahun Anggaran 2016	36
2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	38
3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50
3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	53

3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	28
.4.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala daerah /Wakil Kepala Daerah Kab Sintang dengan Visi dan Misi OKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	62
4.3	Tujuan ,Sasaran ,Strategi dan Kebijakan	69
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021	73
6.1	Matriks Keterkaitan Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sintang 2017-2021.	87



DAFTAR GAMBAR

RENSTRA 2017 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan pertanian di Kabupaten Sintang merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian Nasional dan sejalan dengan pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang tertuang didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pertaniandan Perkebunan Tahun 2017 - 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis yang memuat tentang visi, misi, kebijakan dan strategi pembangunan Pertanian di Kabupaten Sintang, proyeksi pertumbuhan, kendala yang dihadapi dan Program Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang sesuai dengan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021 merupakan kerangka pikiran dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun kedepan, selain itu penyusunan Renstra Dinas Pertaniandan Perkebunan juga untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Renstra Dinas bukan hanya sebagai suatu dokumen perencanaan Unit Kerja yang berisi berbagai kebijakan, program dan strategi pembangunan pertanian secara luas, tetapi juga sebagai sarana untuk melaksanakan pertanggung jawaban publik (*Public Accountability*) dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, agar dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2017-2021 tidak bertentangan dengan pemanfaatan tata ruang, maka dalam penyusunan Renstra memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang.

Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Periode 2017 – 2021 mempunyai hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun hubungan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Renstra Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang periode 2017 – 2021 dengan Renstra Departemen Pertaniandan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat, Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Kesehatan dan Kesehatan Hewan Prov Kalbar, adalah bahwa Renstra Dinas Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Sintang telah memperhatikan Renstra Dinas Pertanian Propinsi dan Renstra Departemen Pertanian yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Sintang;
2. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang periode 2017 – 2021 merupakan penjabaran lebih dari RPJM Kabupaten Sintang dibidang pertanian, perkebunan dan merupakan pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan ; Hubungan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang periode 2017- 2021 dengan dokumen perencanaan teknis adalah bahwa Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan ini merupakan dasar dan kebijakan yang menentukan arah substansi dari dokumen perencanaan teknis Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang.
3. Renstra Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang periode 2017 – 2021 adalah penjabaran dari RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005 - 2025 tahap ke dua yang memuat visi, misi dan program prioritas.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010), tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sintang tahun 2016- 2021 mengalami beberapa perubahan menyangkut Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang termuat dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Program Nawacita dan TRI SAKTI (Program Pemerintahan Presiden RI) yang di Jabarkan ke Dalam Program dan Kegiatan Kementerian .

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan Pertanggung Jawaban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137) ,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang 2005-2025 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2036.
23. Keputusan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang ;

1.3. Hubungan antar Dokumen .

Dalam menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RENSTRA merupakan satu kesatuan yang utuh dalam manajemen Pembangunan pertanian di Kabupaten Sintang khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Pertanian yang tertuang dalam berbagai Dokumen Perencanaan. Hubungan antara RENSTRA dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

a. Renstra dan RPJP Dinas Pertanian Kabupaten Sintang.

Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sintang Tahun 2017 – 2021 merupakan RENSTRA ke Tiga dari tahapan pelaksanaan RPJP Dinas Pertanian Kab.Sintang Tahun 2006 – 2025. Oleh sebab itu, penyusunan RENSTRA selain menjabarkan Visi,Misi dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati Sintang masa bakti 2016 – 2021, juga berpedoman pada visi,misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJP Dinas Pertanian Sintang Tahun 2006 – 2025.

b. RENSTRA dan Dokumen RTRW Kabupaten Sintang

Penyusunan RENSTRA memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

c. RENSTRA dan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang

Penyusunan RENSTRA berpedoman kepada RPJMD yang disusun dan berlaku selama 5 tahun. RENSTRA yang merupakan penjabaran teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap bidang/urusan untuk melaksanakan pembangunan yang berjangka waktu selama 5 tahun yang disinkronkan dengan RENSTRA Dinas Provinsi Kal Bar Dan RENSTRA K/L.

d. RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Dokumen RENJA Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 setiap tahun dijabarkan kembali ke dalam RENJA Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Renja yang disusun mengacu pada hasil pembahasan MUSRENBANG yang dilaksanakan berjenjang mulai dari Tingkat Desa sampai dengan ke Tingkat Provinsi.

Demikian gambaran tentang hubungan antara RENSTRA Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi. Agar Program Pembangunan di Bidang Pertanian dan Perkebunan dapat terarah, efektif, efisien dan terpadu.

RENSTRA ini juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun RENJA Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang akan dibahas dalam forum MUSRENBANG.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 ini adalah

- a. Mensinkronkan Visi, Misi dan agenda pembangunan program Bupati/Wakil Bupati dengan visi, misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan Visi, misi Dinas terkait di Provinsi Kalbar dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan Prov Kalbar, Dinas Perkebunan Prov Kalbar serta visi, misi Kementerian Pertanian, kedalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah dan terukur serta dapat dilaksanakan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021;
- b. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas Program dan kegiatan

- pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sintang, APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBN dan sumber dana lainnya;
- c. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar Dinas Kabupaten dengan Dinas Provinsi dan Kementerian Terkait di tingkat Pusat;
 - d. Menyediakan tolak ukur kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
 - e. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
 - f. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang periode 2017 – 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang :

1. Latar belakang.
2. Landasan hukum
3. Maksud dan tujuan, hubungan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan
4. Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

Memuat informasi tentang :

1. Tugas , fungsidan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ;
2. Sumber Daya Kepegawaian yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang ;
3. Kinerja Pelayanan Dinas (gambaran capaian terhadap SPM) mengulas dan Perlengkapan, sistem, Prosedur. Selain itu memuat, capaian program dan kegiatan ;
4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat tentang

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang ;
2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih ;
3. Telaahan renstra K/L, Renstra Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota ;
4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
5. Penentuan Isu - Isu Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang .

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang

1. Visi dan misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang ;
2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021;
3. Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan ;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini memuat program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Bab IV Pasal 4 disebutkan bahwa kedudukan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Terbentuknya Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan penggabungan dari Sub Dinas Pertanian dan Peternakan, Sub Dinas Perkebunan, dan Sub Bidang Penyuluhan yang ada pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Sintang.

I. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program ;
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum ;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan ;
 - 5(Lima) Bidang Teknis, yaitu:
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Kesehatan masyarakat veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
5. Bidang Pengembangan Perkebunan terdiri dari
 - a. Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan
 - c. Seksi Pengawasan dan Ganguan Usaha Perkebunan
6. Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman terdiri dari ;
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
 - b. Seksi Perbenihan Perkebunan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

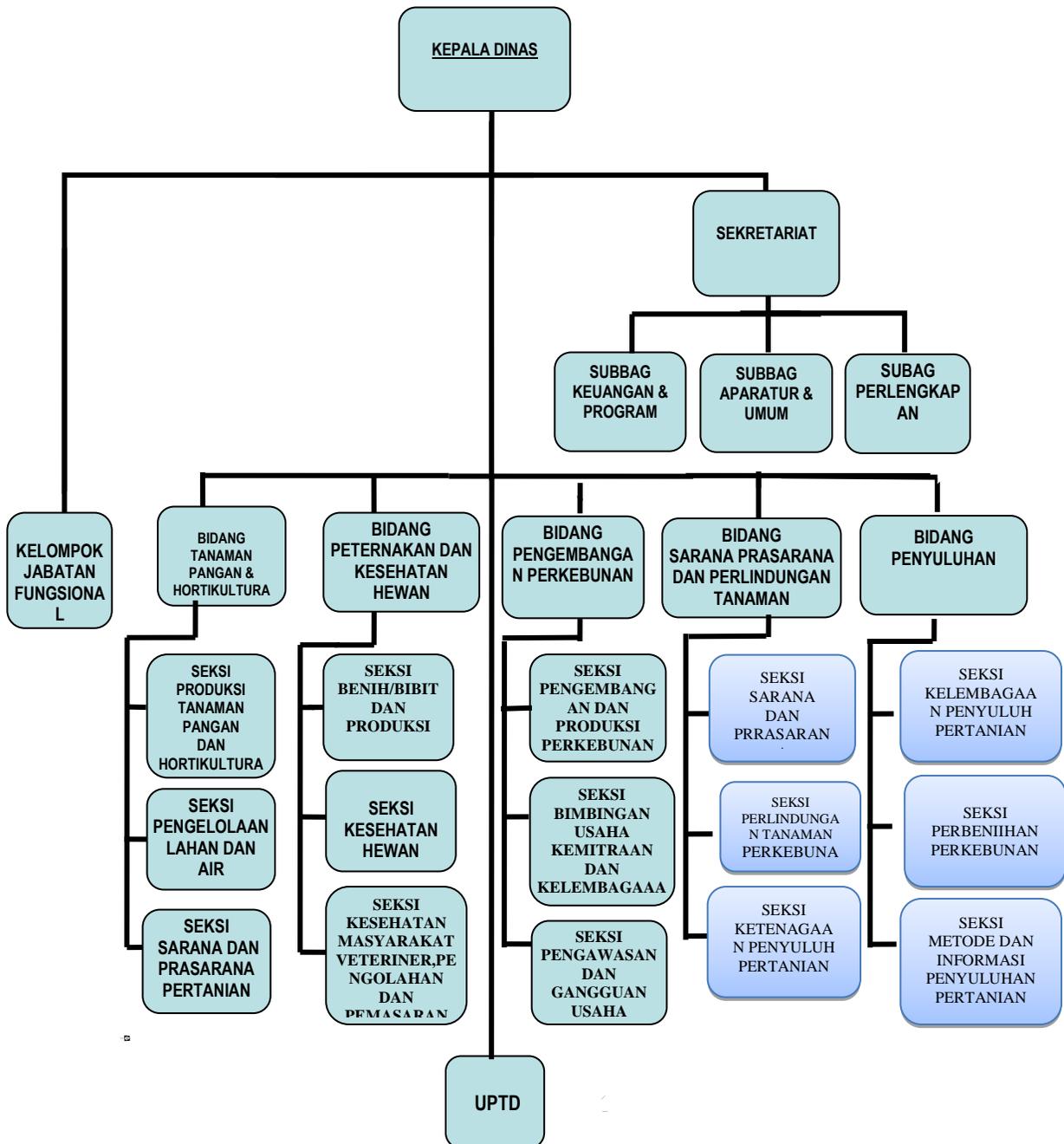
- 7. Bidang Penyuluhan , terdiri dari ;
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian
 - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian
- 8. Kelompok Fungsional

II. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura , Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Pengembangan Perkebunan, Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman, Bidang Penyuluhan serta kelompok fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 Berikut;

Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati Sintang Nomor : 125 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016



III. Kedudukan Dinas Pertanian dan Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 bahwa

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya
- (2) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Yaitu :

Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Perkebunan ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Pertanian dan Perkebunan .
- c. Pembinaan UPTD dibidang Pertanian dan Perkebunan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian , rumah tangga, perlengkapan , humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- g. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang *ertanian dan Perkebunan ;
- i. Penyusunan analisa jabatan ;
- j. Pelaksanaan sistem Pengendalian Internal dan ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- A. Kepala Dinas Mempunyai Tugas : Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan .

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Mempunyai Fungsi :

- a. Penetapan Program Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - b. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan
 - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di Bidang Dinas Pertanian dan Perkebunan
 - d. Pengendalian kegiatan Sekretariat, Bidang Pertanian, Perkebunan, sarana prasarana dan Perlindungan tanaman serta bidang penyuluhan.
 - e. Pembinaan dan Pengawasan ;
 - f. Pelaksanaan sistem pengendalian internal ;
 - g. Penyampaian hasil analisa Jabatan Kepada Bupati
 - h. Penyusunan Perjanjian Kinerja dibidang Pertanian dan Perkebunan
 - i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di Bidang Pertanian dan Perkebunan ;
 - j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pertanian dan perkebunan ;
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang pertanian dan perkebunan ;
 - l. Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
 - m. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- B. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
1. Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 2. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.
 3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan
 4. Penghimpunan peraturan, perundang – undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 5. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 6. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
 7. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan.

8. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan .
 9. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas – tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Pertanian dan Perkebunan .
 10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
 11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok : melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan Program kerja serta laporan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- Subbag Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program Kerja tahunan pada subbag keuangan dan program ;
 - b. Pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Penyiapan usulan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
 - g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program.
 - h. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan, program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - i. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan RKT, dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - j. Pelaksanaan dan pengelolaan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan urusan surat menyurat, kehumasan, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian umum dan aparatur ;
- b) Pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas dibidang umum dan aparatur ;
- c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat /naskah Dinas ;
- d) Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- e) Kegiatan pelaksanaan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Keputusan Kepala Badan, dan atau Surat Lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan kegiatan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang – undangan.
- f) Penyusunan dan penyiapan , mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- g) Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- h) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- i) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum;
- j) Pelaksanaan pengolahan data, urusan surat menyurat keprotokolan, kearsipan dan kepastakaan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

E. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang yang berada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Untuk pelaksanaan tugasnya Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Program kerja tahunan pada Sub Bagian Perengkapan;
- b) Pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan;
- c) Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- d) Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- e) Pelaksanaan penata usahaan aset Dinas ;
- f) Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- g) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - h) Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - i) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - j) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan ;
 - k) Pemberian saran dan pertimbangan serta lapran kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak ; dan
 - l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- F. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok : melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem,fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Untuk pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:
1. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 3. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
 4. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan dibidang tanaman pangan ;
 5. Pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan ;
 6. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan ;.
 7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan ;
 8. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan ;.
 9. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan ;
 10. Pelaksanaan analisa usaha tani Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 11. Pembinaan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 12. Pelaksanaan evaluasi tanam dan panen serta menyusun laporan statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 13. Pelaksanaan pengembangan potensi daerah/lebak maupun lahan kering ;
 14. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana peralatan pertanian ;
 15. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
 16. Pelaksanaan membimbing,mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;

17. Pendistribusian dan pengkoordinasikan tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
18. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak ;
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

F.1. Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi :

1. Perumusan Program kerja Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pengumpulan bahan dan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis penangkar benih bersertifikat dan peredaran benih serta bibit ;
5. Penyaluran benih tingkat benih sebar ;
6. Pelaksanaan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman buah – buahan, sayuran dan tanaman hias ; .
7. Pelaksanaan identifikasi pengembangan hortikultura ;
8. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap penangkar bibit hortikultura ;
9. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pola usaha tani Tanaman pangan dan hortikultura;
10. Penyaluran bibit hortikultura ;
11. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas;
12. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
13. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

F.2. Seksi Pengelolaan lahan dan Air mempunyai tugas : Mengumpul, mengolah dan merumuskan bahyan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi elaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan lahan dan air :

Untuk melaksanakan Tugasnya Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi ;

1. Penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma ,standar prosedur,dan kreteria di bidang Pengelolaan Lahan dan Air ;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan identivikasi ptensi pengembangan Lahan Pertanian ;

4. Pengumpulan dan Penyusunan bahan identifikasi potensi pengelolaan air dan pendayagunaan air sesuai agoekosistem ;
 5. Pelaksanaan survey identifikasi daerah dalam mengembangkan jaringan irigasi desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ;
 6. Pelaksanaan pengembangan potensi pertanian melalui pengembangan daerah rawa/lebak ;
 7. Pelaksanaan pembangunan sumber pengairan pertanian lainnya ;
 8. Pelaksanaan pembangunan aksesibilitas produk – produk pertanian ;
 9. Pengumpulan bahan, analisis dan bimbingan teknis dalam upaya menumbuh kembangkan Kelompok Petani Pengguna dan pengelola air (KP3A);
 10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
 11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- F.3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas : merencanakan, menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, melakukan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian ;
- Untuk melaksanakan tugasnya Seksi sarana Prasarana Pertanian mempunyai Fungsi :
- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian ;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian ;
 - d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian ;
 - e. Pengembangan potensi pengelolaan lahan dan irigasi pertanian ;
 - f. Penyediaan , pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian ;
 - g. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian ;
 - h. Pemberian fasilitas investasi pertanian ;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
 - J. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- G. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;.
 2. Penyiapan bahan perumusan .dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang peternakan dan kesahatan hewan ;
 3. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan,perlindungan serta dan kreteria dibidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
 4. Pengelolaan sumber Daya genetik hewan ;.
 5. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit, ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak ;
 6. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ; .
 7. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 8. Pegawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikat benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak; dan
Pakan ,hijauan pakan ternak dan obat hewan ;
 9. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 10. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
 11. Pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan,kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
 12. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;
 13. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
 14. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan ; dan
 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- G.1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kabijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit ,pakan, dan produksi dibidang peternakan ;
- Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai fungsi ;
- a. Penyusunan program kerja Seksi Benih/bibit dan produksi ;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang benih/bibit dan produksi ;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana adan anggaran seksi benih/ bibit dan produksi ;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi dibidang peternakan ;
 - e. Penyiapan bahan, penyediuaan dan peredaran pakan ,benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) ;
 - f. Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) ;
 - g. Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan,benih /bibit HPT ;

- h. Penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT ;
- i. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian ;
- j. Pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak ;
- k. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak ;
- l. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih/bibit dan produksi peternakan ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

G.2. Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Tugas : Melakukan Penyiapan bahan penyusunan kejakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan nevaluasi dibidang kesehatan hewan ;

Untuk pelaksanaan tugasnya Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Kesehatan Hewan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan ;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor ;
- e. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- f. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan ;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan ;
- h. Penyiapan bahan penanggulangan ,penutupan dan pembukaan daerah wabah daerah penyakit hewan menular ;
- i. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan ;
- j. Penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan ;
- k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Hewan ;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya ;

G.3. Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;

Untuk Melaksanakan tugasnya Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;

- d. Penyiapan bahan Penilaian penerapan penanganan limbah dampak, higiene dan sanitasi usaha produk hewan ;
 - e. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil ;
 - f. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan ;
 - g. Pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan ;
 - h. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan ;
 - i. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis ;
 - j. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban ;
 - k. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
 - l. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
 - m. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
 - n. Pelayanan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
 - o. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
 - p. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
 - q. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
 - r. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan ;
 - s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;
- H. Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Pengembangan Perkebunan ;
- b. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan ,produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, bimbingan usaha,kemitraan dan kelembagaan perkebunan serta pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- c. Penyusunan rencana pengembangan dibidang perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi ;
- d. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang perkebunan ;
- e. Pemberian bimbingan pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang perkebunan ;
- f. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi dibidang perkebunan ;

- g. Pemberian bimbingan usaha dan kemitraan serta kelembagaan dibidang perkebunan ;
 - h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang perkebunan ;
 - i. Penanggulangan gangguan usaha , dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan ;
 - j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produksi ,kelembagaan dan gangguan usaha perkebunan ; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- H.1. Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan produksi perkebunan ;
- Untuk melaksanakan tugasnya Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program Kerja Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi dan kebijakan peningkatan mutu, produksi dan produktivitas komodity perkebunan ;
 - e. Penyiapan rencana pengembangan perkebunan dan peningkatan mutu dan produksi perkebunan ;
 - f. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan ;
 - g. Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna lahan perkebunan ;
 - h. Penyiapan bahan bimbingan peningkatan mutu produksi dan produktivitas perkebunan ;
 - i. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan ;
 - j. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan ;
 - k. Penyiapan dan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang perkebunan ;
 - l. Pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian data statistik perkebunan ;
 - m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan dan produksi perkebunan ; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;
- H.2. Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta peraturan dan evaluasi di bidang bimbingan usaha,kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang bimbingan usaha kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
- c. Penyusunan norma,standar, prosedur dan kreteria di bidang bimbingan usaha, kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan proses perizinan, pendaftaran dan rekomendasi dan usaha perkebunan ;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama kemitraan usaha perkebunan ;
- h. Pembinaan kelembagaan perkebunan ;
- i. Pelaksanaan penilaian fisik dan teknis kebun kemitraan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang perkebunan
- k. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk bidang perkebunan ;
- l. Penyiapan bahan bimbingan teknis pemasaran hasil dibidang perkebunan
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil dibidang perkebunan ;
- n. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

H.3. Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan dan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- e. Penyiapan bahan panyusunan kebijakan di bidang Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- f. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi usaha dibidang perkebunan ;

- g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan SDA/lahan secara lestari;
 - h. Penyelenggaraan penilaian usaha perkebunan ;
 - i. Pencegahan dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan ;
 - j. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan ;
 - k. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan terhadap kebakaran kebun dan lahan;
 - l. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit dinas terkait ;
 - m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;
- I. Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan :
- Pada Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan mempunyai Tugas : melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;
- Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan mempunyai fungsi ;
- a. Penyusunan program kerja bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan perkebunan, saranaa dan prasarana perkebunan, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan ;
 - d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perkebunan ;
 - e. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan ;
 - f. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan pestisida di bidang perkebunan ;
 - g. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan ;
 - h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana, perbenihan , perlindungan tanaman perkebunan ; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- I.1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan,dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang sarana dan prasarana perkebunan.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana dan prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi perkebunan ;
 - e. Penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, embung bangunan perkebunan, alat dan mesin perkebunan ;
 - f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;
- I.2. Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan perkebunan ;
Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program kerja Seksi Perbenihan Perkebunan ;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang perbenihan Perkebunan ;
 - c. Penyusunan norma , standar, prosedur dan kreteria di bidang perbenihan perkebunan ;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perkebunan ;
 - e. Penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih/bibit di bidang perkebunan ;
 - f. Pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit tanaman perkebunan ;
 - g. Perencanaan kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan ;
 - h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih/bibit dan kelembagaan perbenihan dibidang perkebunan ;
 - i. Pemberian bimbingan teknis perbenihan dibidang perkebunan ;
 - j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perbenihan perkebunan ; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;
- I.3. Seksi Perlindungan Tanaman perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;
Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi ;
- a. Penyusunan Program kerja seksi Perlindungan Tanaman perkebunan ;

- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan Tanaman perkebunan ;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dibidang perkebunan ;
 - e. Pengelolaan data organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
 - f. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
 - g. Penyiapan bahan Sekolah Lapang pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan ;
 - h. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;
 - i. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang perkebunan ;
 - j. Pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman di bidang perkebunan ;
 - k. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perlindungan Tanaman perkebunan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;
- J. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Penyuluhan ;
 - b. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya ;
 - c. Penyusunan kebijakan dan program dibidang penyuluhan pertanian ;
 - d. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang pertanian ;
 - e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta ;
 - g. Pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan ;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan laporan dibidang penyuluhan pertanian ; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- J.1. Seksi Kelembagaan penyuluhan Pertanian mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan penyuluhan pertanian ;
- Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai fungsi ;
- a. Penyusunan Program kerja Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
 - b. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
 - d. Penyusunan dan pengelolaan data base dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
 - e. Penyiapan bahan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ;

- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian ;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian ;
- h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

J.2. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang metode dan informasi penyuluhan pertanian ; Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian ;
- e. Penyusunan Materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
- f. Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
- g. Penyiapan bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian ;
- h. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan pertanian ;
- i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode,dan Informasi penyuluhan pertanian ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam Bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsioanal terdiri dari Sejumlah Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu ;

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati Sintang ;
- 3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ,
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai perraturan perundang - undangan ;

2.2. Sumberdaya

a.Sumberdaya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per APRIL 2017)

No	JenisKelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	113
2	Perempuan	44
Jumlah		158

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	TingkatPendidikan	Jumlah
1	PascaSarjana (S2)	9
2	Sarjana (S1)	100
3	Diploma	8
4	SLTA	41
5	SLTP	-
Jumlah		158

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	JenisDiklat	Jumlah
1	Spamen / Diklatpim II	2
2	Spama / Diklatpim III	1
3	Adum / Diklatpim IV	9
Jumlah		12

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV.C)	1
	Pembina Tingkat .I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	13
	Jumlah	15
3	Penata Tk I (III/d)	28
	Penata (III/c)	34
	Penata Muda Tk. I (III/b)	36
	PenataMuda (III/a)	23
	Jumlah	121
4	Pengatur Tk. I (II/d)	12
	Pengatur (II/c)	5
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5
	PengaturMuda (II/a)	-
	Jumlah	22
5	Juru (I/c)	-
	Jumlah	-
	JumlahKeseluruhan	158

Tabel 2.5

Keadaan Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
Menurut Status Tahun 2017.

No	Keadaan Pegawai	Status Pegawai			Jumlah
		Pusat DPK	Pusat DPB	Daerah	
1	2	3	4	5	6
1.	Pegawai Negeri Sipil	-	-	158	158
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-	-
3.	Tenaga Honor Struktural / Fungsional Tenaga PHP (PN)	-	1	22	23
4.	Tenaga Honorer	-	-	16	16
5	Tenaga BPSB	-	-	-	-
	Jumlah	-	1	196	197

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan diperlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sarana dan prasarana kerja ini secara rinci dapat dilihat berturut – turut pada tabel berikut :

Tabel.2.6
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pertaniandan Perkebunan
Kabupaten Sintang

No.	Jenis	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Dinas	
	➤ Roda 4	4
	➤ Roda 2	20
2.	Peralatan Kantor	
	➤ Komputer Desk Top	6
	➤ Note Book / Lap Top	13
	➤ Telephone	1
	➤ Faximile	1
	➤ Mesin Tik	2
	➤ Lemari	15
	➤ Rak Buku	6
	➤ Filling Kabinet	7
	➤ Brankas	1
	➤ Meja Kerja	39
	➤ Kursi Kerja	85
	➤ Kipas Angin	10
	➤ AC	7
	➤ Kulkas	2
	➤ Alat Sounds System	2
	➤ Camera Digital	2
	➤ Handy Cam	1
	➤ LCD Monitor	2
	➤ LCD Proyektor	2
➤ GPS	3	
➤ Mesin Potong Rumput	2	
➤ Dispenser	-	
3.	Bangunan/Gedung	
	➤ Kantor	2
	➤ RPH Unggas	1
	➤ Gudang	1
	➤ Rumah Dinas	41
	➤ Klinik Hewan	5

Tabel .2.7

Jumlah Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pada Petani Melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang Ada Dilapangan (Exsisting) s/d Tahun 2016.

No.	Jenis Alat	KONDISI		
		Baik	Rusak Berat	Jumlah
1	Traktor roda 2	232	-	232
2	Traktor roda 4	1	-	1
	- Traktor mini		-	
	- Traktor sedang	1	-	1
3	Hand Sprayer	4.375	882	5.257
4	Knapsack power spayer	14	1	15
5	Skid power sprayer	4	1	5
6	Emposan tikus	440	200	640
7	Sabit bergerigi	972	138	1.110
8	Pedal thresher	167	12	179
9	Power thresher	100	-	100
10	Pembersih gabah	6	-	6
11	Pengering gabah	4	-	4
12	Combine Harvester (Sedang)	6	-	6
13	Combine Harvester (Kecil)	10	-	10
14	Penggiling padi kecil (Small Rice Mill)	218	38	256
15	Rice Milling Unit (RMU)	226	-	226
16	Pemecah kulit gabah (Husher)	35	4	39
17	Penyosoh beras pecah kulit	33	3	36
18	Pemipil jagung	43	-	43
19	Pemarut singkong	128	4	132
20	Pembuat pellet	25	-	25
21	Perajang	62	1	63
22	Rice Transplanter	11	-	11
23	Pompa Air	35	-	35

Tabel .2.8

Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Dioperasikan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan

No	Kecamatan	Jumlah Alsintan (unit)				
		Hand Traktor	Power Thresher	RMU	Drayer	Pompa Air
1.	Kelam Permai	5	4	2	1	4
2.	Binjai	5	5	2	-	12
3.	Dedai	3	1	1	-	7
4.	Sei. Tebelian	7	6	2	-	19
5.	Sepauk	5	5	2	1	11
6.	Tempunak	4	5	3	3	19
	Jumlah	29	26	12	5	72

Tabel .2.9
Sarana Pengendalian / Proteksi Tanaman

No	Kecamatan/Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan sepeda Motor		
2	Peralatan		
	- Swing Fox	1	
	- Mist Blower	70	Di Gudang
	- Hand Sprayer	30	Di Gudang
	- Emposan Tikus	-	Di gudang
	- Power Sprayer	-	

Tabel.2.10

Sarana Infrastruktur Pertanian yg telah dibangun Sampai dengan Tahun Anggaran 2016

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Jaringan perpipaan	31.476 Meter	Kumulatif s/d Th 2016
2.	Embung	132 Unit	sda
3.	Kolam penampung air	14 Unit	sda
4.	Cekdam /Dam Parit	90 Unit	sda
5.	Sumur gali dan pompa portable	66 Unit	sda
6.	Bak Air induk	15 Unit	sda
7.	Jalan usaha tani	748,48 km	sda
8.	Bangunan pengumpul buah	3 Unit	sda
9.	Bangunan packing, grading, sortasi	3 Unit	sda
10	Jaringan Irigasi Desa/Jitut	1.392,152 km	sda
11.	Pencetakan Sawah Baru	2.392 ha	Th.2016 = 1.732 ha
12.	Sumur Bor	28 unit	sda

c. Anggaran

Dalam pembiayaan pembangunan pertanian, peran anggaran pemerintah disamping sebagai stimulus investasi, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pertanian di daerah juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan. Anggaran menjadi salah satu penentu keberhasilan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, kemampuan penganggaran menjadi pendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam usaha tani untuk mencapai tujuan pembangunan. Perkembangan anggaran Dinas Pertaniandan Perkebunan disajikan pada Tabel 2.1.

2.3. Kinerja Pelayanan

Serapan anggaran dari dana APBD untuk Tahun 2011 Sebesar Rp 17.060.951.000,- Dari total alokasi anggaran Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang (SKPD.Lama),sebesar RP 17.618.629.000,- (96,83 %) , tahun 2012 serapan anggaran sebesar Rp 22.610.877.000 ,- dari alokasi anggaran Rp 23.378,363.000 ,- (96,72 %) sedangkan pada Tahun 2013 serapan anggaran sebesar Rp 25.483.527.000,- dari alokasi anggaran Rp 25.797.705.000,- (98,78 %) , pada tahun anggaran 2014 serapan dana sebesar Rp 40.015.825.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 40.798.414.000,- (98,08 %) serta serapan sebesar Rp 57.755.034.000,- (96,84 %) dari alokasi anggaran sebesar Rp 59.639.935.000,- pada tahun anggaran 2015 . pada tabel berikut dapat dilihat Realisasi APBD Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang pada tahun 2011 – 2015.

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa serapan anggaran mulai dari Tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan penyerapan anggaran, kemudian terjadi kembali penurunan 1 digit pada tahun anggaran 2014 dan pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan penyerapan anggaran yang menyamai angka pada tahun pertama RENSTRA Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang (Tahun 2011) hal ini dengan semakin bertambahnya pagu anggaran secara signifikan sehingga penyerapan mengalami penurunan. (dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2)

Gambaran kinerja pelayanan OPD melalui pendekatan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan selama periode Renstra tahun 2017 – 2021 dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dapat dijelaskan sebagai berikut ;

A. Aspek pembangunan infra struktur,sarana dan prasarana pertanian dan keterbukaan informasi publik bidang pertanian pada periode 2017 – 2021 secara umum dengan capaian indikator kinerja sasaran :

- Tersedianya infrastruktur dasar pertanian,sarana dan prasarana pertanian 100 % di 14 Kecamatan .
- Jalan Usaha Tani 25 km
- Jaringan irigasi 2.400 ha
- Sarana Pengairan/TAM 100 ha
- Alat Mesin Pertanian 55 unit
- Lahan Pertanian baru (pencetakan sawah baru) = 1.000 ha
- Embung ; 10 Unit .
- Dam Parit : 20 Unit .
- Pintu Air : 30 Unit .
- Sumber Air tanah untuk pengairan (sumur gali /sumur Bor) : 100 unit

B. Aspek Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian pangan daerah 100 % di 14 Kecamatan .

- Pengembangan tanaman padi, jagung dan kedelai (Pajale) = 500 ha /thn, 100 ha/thn, 25 ha/thn .
 - Pengembangan tanaman hortikultura terutama cabe, bawang merah dan buah – buahan = 10 ha / thn.
 - Sasaran produksi tanaman Padi , Jagung dan Kedelai = 93.608 ton, 2.900 ton, 1.200 ton.
 - Target dan sasaran Produktifitas tanaman Padi, Jagung dan Kedelai = 35,5 kw/ha, 32 kw/ha, 12 kw /ha
- C. Aspek Pembangunan Peternakan Rakyat untuk pengembangan dan penyebaran populasi ternak di Kabupaten Sintang = 100 % (pengembangan kawasan sentra produksi ternak .
- Kegiatan Pelaksanaan UPSUS PETERNAKAN/SIWAB dengan sasaran = 5.000 ekor
 - Kegiatan Pengembangan ternak Kambing = 200 ekor
 - Kegiatan pengembangan ayam buras bagi petani pedesaan daerah tertinggal = 668 eko
 - Kegiatan pembangunan HMT sebanyak = 40 ha
 - Kegiatan pengendalian Penyakit Rabies untuk penyediaan vaksin = 2.164 botol
 - Kegiatan pengendalian penyakit hewan ternak lainnya sebanyak 4 kegiatan dengan sasaran = 5.000 ekor
- D. Aspek Pembangunan Perkebunan Rakyat ; untuk pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
- Kegiatan Pengembangan komoditas karet rakyat = 5.000 ha
 - Kegiatan Perluasan Pengembangan Kelapa Sawi rakyat = 2.000 ha
 - Kegiatan Pengembangan komoditas Lada = 900 ha
 - Kegiatan pengembangan komoditas kopi = 300 ha
 - Kegiatan Pengembangan komoditas kakao = 300 ha
- E. Dari Aspek Pengembangan SDM Penyuluh Pertanian untuk mendukung program-program OPD Dinas Pwrtanian dan Perkebunan Kab.Sintang antara lain ;
- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan = 8 BPP Kecamatan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKT Penyuluh = 14 kecamatan
 - Menitoring dan evaluasi pelaksanaan Kinerja Penyuluh = 14 kecamatan
 - Gelar Teknologi pertranian tingkat Kabupaten = 1 kali /tahun. = 4 kali

Adapun realisasi atau hasil – hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pertanian dari Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

2.3.1. Capaian Produksi komoditas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan.

Capaian Produksi komoditas tanaman pangan selama tahun 2011 – 2015 mengalami plugtuasi turun naiknya produksi pada komodity padi hal ini disebabkan adanya anomali iklim yang mengakibatkan pengaruh pada produksi padi indikator terswebut dapat dilihat pada tabel Produksi padi dan Palawija selama 5 Tahun :

Dari Tabel data tersebut dapat dianalisa :

Rata – rata produksi padi pada Tahun 2011 – 2015 mencapai **86.409** ton/tahun Gabah Kering Giling dengan tingkat pertumbuhan \pm (- 1 %) dari awal tahun pelaksanaan . Sedangkan pertumbuhan produktivitas - 5 %

Rata – rata produksi palawija pada Tahun 2011 – 2015 mencapai **44.400**ton/tahun dengan tingkat pertumbuhan \pm (57 %) dari awal tahun pelaksanaan . Sedangkan pertumbuhan produktivitas 28,36 %

Rata – rata produksi peternakan mengalami tingkat pertumbuhan yang absolut yaitu dengan rata-rata mencapai ; **3.089** ton/tahun (15,10 %).

Sedangkan rata – rata produksi pada Bidang Perkebunan Pada komodity Karet mencapai **143.740** ton / tahun dengan tingkat pertumbuhan \pm (- 2,34 %) .

Dan untuk rata – rata produksi pada komodity kelapa sawit mencapai =386.547 ton (thn 2015) dengan tingkat pertumbuhan \pm (- 9,88 %).

2.3.2. Capaian Kegiatan Penunjang Lainnya .

Kegiatan penunjang lainnya melalui Program peningkatan Ketahanan Pangan adalah Tahun 2011 – 2015 diantaranya adalah Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Komodity Padi , Jagung dan Kedele yang pendanaannya bersumber dari APBN (Tugas Pembantuan) program ini untuk meningkatkan SDM Petani dan bantuan modal untuk penanaman komodity pangan utama; yang mulai Tahun 2015 Program Tersebut berganti menjadi GPTT (Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu).

Program Pengelolaan Lahan dan Air yaitu program yang membangun prasarana dan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan pembukaan lahan pertanian baru untuk menunjang swasembada pangan.

Serta Program dan Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian untuk para petani dalam pelaksanaan mekanisasi dibidang pertanian. Penyebaran Bibit ternak kepada masyarakat dansarana bibit perkebunan keseluruhan pendanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBD Kab.Sintang.

Kegiatan penunjang lainnya untuk mencapai target pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan infrastruktur pertanian dimana selama periode 2011 s.d 2015 telah diupayakan seluas 5.491 Ha, yang terdiri dari :

- a. Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) seluas 1.192 Ha
- b. Jaringan Irigasi desa (Jides) seluas 4.164 Ha
- c. Tata Air Mikro (TAM) seluas .135.Ha

Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 732 Km

Penambahan infrastruktur yang dilakukan oleh kementerian

Pertanian dan Pemerintah Daerah yang paling banyak dilakukan pada

Tahun 2011, seluas 410Ha,pembangunan sawah baru yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota.

sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pemberian bantuan alsintan selama periode 2011 – 2015 sebanyak

252. Unit, yang terdiri dari hand traktor, traktor roda 4, power thresher, pompa air, dryer ,Rice Transplanter,Combine Harvester dan rice milling unit. Untuk tahun 2012 kementerian pertanian dan pemerintah daerah melalui APBD memberikan bantuan berupa appo, copper, pedalthresher dan mesin tebas./panen.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Guna memfokuskan strategi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor – faktor kunci keberhasilan (critical succes factors). Faktor keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari ;

- a. Kekuatan dan kelemahan , sebagai lingkungan internal Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- b. Tantangan dan kendala sebagai lingkungan eksternal Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah **Analisis SWOT**. SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities*(peluang), dan *Threats* (Ancaman).

2.4.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

A. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis,dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati ; faktor – faktor tersebut adalah :

- 1) Adanya dukungan Peraturan Perundang – Undangan
- 2) Jumlah ,Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja Aparatur yang tersedia cukup memadai .
- 3) Pelatihan teknis fungsional/ administratif bagi aparatur sering dilaksanakan
- 4) Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai

B. Kelemahan (Weakness)

Ada beberapa kelemahan internal yang akan dapat menghambat kelancaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan .

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan adalah :

- 1) Profesionalisme pegawai yang masih belum memadai
- 2) Kerjasama dan koordinasi antar pegawai masih kurang berjalan dengan baik
- 3) Distribusi pegawai masih belum seimbang pada seluruh bidang dan seksi
- 4) Sistem informasi manajemen belum berfungsi secara maksimal
- 5) Tindak lanjut waskat yang belum optimal
- 6) Inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum optimal

2.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam mencapai visi dan misi diantaranya adalah :

- 1) Terbukanya pasar bagi produk-produk pertanian hal ini diindikasikan dengan masih banyak didatangkannya produk pertanian, peternakan dari daerah luar Kabupaten Sintang.
- 2) Adanya tuntutan masyarakat akan pangan yang baik, sehat dan bermutu cukup tinggi
- 3) Tersedianya Potensi sumberdaya alam (lahan, air dan agroklimat) yang potensial untuk perkembangan tanaman pangan, Hortikultura dan peternakan .
- 4) Minat masyarakat pada sektor pertanian, peternakan relatif cukup tinggi .
- 5) Adanya keanekaragaman usaha tani, komoditas yang dapat dikembangkan
- 6) Tersedianya bahan baku yang dapat digunakan sebagai pupuk alternatif, bahan pakan ternak .
- 7) Tersedianya teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber
- 8) Adanya Kebijakan Pemerintah yang mendukung sektor pertanian, peternakan dan Perkebunan.
- 9) Tersedianya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan yang cukup memadai.

Selain peluang yang telah diuraikan tersebut diatas terdapat pula ancaman / tantangan / kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama yang datang dari luar Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang akan berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun ancaman / tantangan tersebut diantaranya:

- 1) Tingkat SDM petani secara umum masih sangat rendah
- 2) Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian
- 3) Ketersediaan petugas lapangan masih belum ideal dengan luas wilayah binaan kelompok
- 4) Alih fungsi lahan dari pertanian pangan ke perkebunan besar
- 5) Rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian, peternakan dan perkebunan..
- 6) Luas kepemilikan lahan pertanian yang relatif kecil dan tersebar
- 7) Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman, ternak dan perkebunan dan terjadinya anomali iklim
- 8) Minimnya modal yang dimiliki oleh petani, peternak dan untuk usaha tani/perkebunan rakyat.
- 9) Tingkat Kesuburan tanah yang rendah
- 10) Penerapan teknologi belum optimal (pra dan pasca panen)

- 11) Harga agroinput cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian, peternakan dan perkebunan rakyat cenderung murah pada saat panen.
- 12) Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi pertanian, peternakan dan perkebunan rakyat belum dapat memenuhi permintaan pasar.
- 13) Akses Petani terhadap perbankan masih rendah
- 14) Kelmbagaan petani dan Desa masih belum berfungsi secara optimal
- 15) Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dan rendahnya tingkat partisipasi petani untuk merawat sarana dan prasarana tersebut
- 16) Rendahnya penerapan teknologi pertanian peternakan dan perkebunan oleh petani
- 17) Perubahan Iklim yang sering mengancam terjadinya gagal panen yang akan berakibat kelangkaan/krisis pangan
- 18) Pertambahan laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan produksi bahan pangan yang dihasilkan
- 19) Aspek distribusi sarana pertanian yang terhambat dengan infrastruktur transportasi yang tidak memadai

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Kondisi dan permasalahan Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu:

- a. Fungsi sumber daya manusia
Terdapat kekurangan staf di beberapa Seksi yaitu Seksi Produksi Padi Palawija dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Peternakan dan Bidang Perkebunan dan Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bag Aparatur dan Umum Sub Bag Perlengkapan. Selain itu keterampilan (manajemen dan teknis) masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan, kursus, diklat, bimtek dan lain-lain;
- b. Fungsi Sarana dan Prasarana
Keterbatasan sarana dan prasarana kantor berpengaruh terhadap kinerja Dinas yaitu berupa Keterbatasan ruang kerja dan pengaturan tata ruang. Dilihat dari jumlah pegawai akibat penggabungan 3 (tiga) Unit Kerja maka sudah selayaknya dilakukan pengembangan ruang Kantor dan terpusat menjadi satu mengingat masih cukup luas lahan yang tersedia karena pembangunan gedung Dinas pertanian yang baru selesai tidak dirancang untuk penggabungan beberapa SKPD seperti yang terjadi saat ini, sehingga koordinasi antar Bidang dapat lebih efisien (tenaga, waktu dan biaya)
- c. Fungsi Anggaran
Keterbatasan anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang ingin dicapai.
- d. Fungsi Perencanaan
Perencanaan sebagai sarana awal mencapai tujuan pembangunan pertanian belum bersifat komprehensif, sehingga dalam operasional pembangunan pertanian terdapat beberapa bidang pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana pertanian, infrastruktur jalan produksi, tata niaga produk pertanian

Permasalahan Ekternal:

a. Alih fungsi lahan.

Lahan-lahan potensial dan fungsional umumnya terdapat di daerah-daerah bekas transmigrasi dimana sejak sepuluh tahun terakhir telah dikembangkan perkebunan-perkebunan besar swasta. Perkebunan tersebut telah memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perkebunan karet dan kelapa sawit.

Percetakan dan pembangunan sawah baru belum mampu secara signifikan menjadi buffer produksi pangan beras pada khususnya.

b. Akses permodalan terbatas.

Keterbatasan modal ini terutama karena petani kurang mampu memenuhi persyaratan dan prosedur pengajuan kredit kepada lembaga keuangan formal, akibatnya usaha pertanian menghadapi keterbatasan modal.

c. Rantai tataniaga panjang dan belum adil.

Kondisi infrastruktur pedesaan (transportasi, pasar, dan gudang) yang belum memadai, menyebabkan rantai tataniaga menjadi panjang, akibatnya petani, peternak menjadi kurang dekat dengan pasar dan posisi tawar petani di pasar menjadi lemah.

d. Kualitas sumberdaya petani, peternak masih rendah.

Tingkat pendidikan petani, peternak dan petani perkebunan rakyat pada umumnya masih rendah, hal ini mengakibatkan petani kurang mampu mengakses informasi teknologi, pasar, dan pembiayaan.

e. Kelembagaan (kelompok) tani lemah.

Pembentukan kelembagaan (kelompok) tani selama ini lebih banyak insidental dan temporer, sehingga keberadaannya menjadi lemah terutama ketika kegiatan berakhir. Penguatan kelembagaan (kelompok) tani diperlukan agar usaha tani dapat berkelanjutan.

f. Infrastruktur pertanian.

Kebutuhan infrastruktur pertanian, utamanya sarana irigasi, jalan pertanian dan pedesaan, pasar pertanian, pasar ternak, transportasi, pengolahan hasil, dan pemasaran masih terbatas, akibatnya usaha pertanian, peternakan dan perkebunan rakyat masih kurang berkembang. Penerapan inovasi teknologi sering terhambat karena tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti penyediaan input produksi, jaringan informasi atau infrastruktur pemasaran hasil.

- g. Teknologi mekanisasi , pra dan pasca panen belum berkembang
Produksi pertanian, peternakan dan perkebunan rakyat di Kabupaten Sintang sebagian besar masih dalam bentuk produk primer dan memiliki tingkat kehilangan hasil yang tinggi. Hal ini mencirikan bahwa teknologi mekanisasi dan pasca panen belum berkembang dengan baik atau walaupun ada belum dimanfaatkan secara optimal.
- h. Sarana Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan rakyat
Sarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk, pestisida, pakan ternak dan sarana pertanian lainnya merupakan komponen utama untuk mendukung peningkatan produksi dalam upaya penyediaan pangan dan pengembangan agribisnis. Kelangkaan sarana produksi, mahalnya input dapat menjadi faktor pembatas peningkatan produktivitas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, MajuReligius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021 ”

Ada enam kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu:

- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas**, adalah dimana keadaan masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperdaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sehat**, adalah keadaan dimana kondisi masyarakat baik jasmani maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi (tingkat harapan hidupnya tinggi).
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju**, adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan yang luas dengan pemanfaatan segala potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang..
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Relegius**, adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai – nilai luhur agama yang dianutnya.
- **Sejahtera** , adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata .
- **Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** adalah keadaan dimana Pemerintah Daerah menerapkan nilai – nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021, tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah :

- 1) Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat,
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman ,penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan majemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari visi ,Misi pembangunan Kabupaten Sintang 2016 -2021faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang terkait dengan bidang pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang seperti pada Tabel3.1 berikut.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi 5 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
	1. Program Peningkatan Produksi,Pertanian/Perkebunan	Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian bahan pangan utama	Produktivitas lahan,inefisiensi tata niaga, lemahnya manajemen usahatani serta fluktuasi harga dan ketersediaan sarana produksi yang terbatas (benih.bibit yang bersertifikat),mahalnya biaya sarana produksi.	Ketersediaan sumberdaya alam, sumber daya manusia dan agroklimat yang mendukung.
	2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belum terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau	,Alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian,rendahnya kepemilikan lahan pertanian dan kurang infrastruktur dasar pertanian	Tingginya permintaan pasar akan produk pertanian, peternakan dan perikanan
	3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Belum optimalnya Penerapan Teknologi pertanian/Perkebunan dan peternakan	Kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah	Kemauan dan keingintauan petani untuk memanfaatkan teknologi,ketersediaan

				sumber dan informasi yang ada.
	4. Program dan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak	Belum seluruhnya Kecamatan dan Desa dapat dilayani dalam penanggulangan penyakit hewan dan ternak (Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak)	Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan keterbatasan tenaga operasional pelayanan kesehatan hewan dan ternak serta jangkauan pelayanan yang luas	Keterbukaan masyarakat menerima informasi akan bahaya penyakit ternak
	5. Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rendahnya produksi hasil peternakan	Penyebaran ternak tidak merata dan kurangnya populasi ternak	Kebutuhan yang tinggi akan daging dan pakan hewani
	6. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Belum optimalnya penerapan teknologi peternakan	Kualitas sumberdaya manusia	Kemauan dan keingintauan petani untuk memanfaatkan teknologi
	7. Program Peningkatan Keamanan Produk Hewan	Keamanan dan kesehatan produk pangan asal hewan masih belum dilaksanakan secara optimal	Sarana dan prasarana pemrosesan produk asal hewan yang masih belum tersedia secara optimal	Tingginya permintaan pasar akan produk hewan (daging) untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen

	8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani masih belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan	input Sarana dan prasarana pertanian yang tersedia masih belum memadai serta keterbatasan modal infestasi petani masih sangat lemah.	Tersedianya potensi sumber daya alam dan tingginya permintaan pasar akan produk-produk pertanian,peternakan dan perkebunan.
	9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Masih rendahnya hasil produksi komodity perkebunan rakyat.	Rendahnya kemampuan modal petani untuk pengadaan sarana produksi dalam pengembangan dan intensifikasi komodity perkebunan	Tersedianya potensi sumber daya alam dan peluang permintaan pasar akan produk hasil perkebunan rakyat
	10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Masih belum adanya kelembagaan dibidang pemasaran produk hasil pertanian/perkebunan yang dapat memenage pemasaran hasil produksi petani dan sistem informasi pasar yang belum dapat diakses secara maksimal oleh para petani/kelompok tani	Ketersediaan SDM yang dapat dan mampu mengelola kelembagaan pemasaran dan informasi pasar masih kurang tersedia	Tersedianya potensi sumber daya alam dan peluang tentang permintaan pasar produk pertanian ,peternakan dan perkebunan
	11. Program Pemberdayaan Penyuluh	Jumlah tenaga penyuluh yang tersedia dengan jumlah desa /Kecamatan dan luas wilayah yang ada di Kabupaten Sintang tidak sebanding, sehingga jangkauan untuk sampai kepada petani yang akan dilakukan pendampingan dan bimbingan dalam adopsi teknologi pertanian masih belum terpenuhi (penyampaian infomasi dan adopsi teknologi pertanian berjalan lambat).	Ketersediaan SDM penyuluh yang masih kurang,sarana dan prasarna penyuluhan masih belum memadai,keterbatasan dana dalam aplikasi teknologi pertanian sebagai percontohan.	Ketersediaan media informasi melalui televisi,radio,internet dan sosial media dapat membantu menyampaikan informasi tentang teknologi pertanian dapat diakses langsung oleh petani dan kelompok tani sehingga tranfer of teknologi pertanian kepada petani menjadi salah satu pemecahan masalah yang dapat diatasi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Pertanian

Renstra Kementerian merupakan salah satu acuan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan program pembangunan pertanian untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

Visi Kementerian Pertanian adalah ***“TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN BIO - INDUSTRI BERKELANJUTAN YANG MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK BER NILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI “***

MISI Kementerian Pertanian

- 1) Mewujudkan kedaulatan Pangan
- 2) Mewujudkan Pertanian Bio Industri berkelanjutan
- 3) Mewujudkan kesejahteraan petani
- 4) Mewujudkan Reformasi birokrasi

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedele, peningkatan produksi daging dan gula	Belum tercapainya Swasembada pangan (padi, jagung dan kedele serta daging)	Kuantitas, kontinuitas, Produksi rendah, ketersediaan infrastruktur lahan dan air, , konversi lahan Potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan perubahan iklim global	Sumberdaya alam yang melimpah untuk pengembangan pertanian
2.	Peningkatan Diversifikasi Pangan	Belum optimalnya diversifikasi pangan	Pola konsumsi masyarakat masih terfokus pada beras	Beragamnya komoditas pangan tropis yang dapat tumbuh dan di kembangkan
3.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.	Rendahnya Nilai Tambah, Daya Saing, produk pertanian, peternakan	Usaha tani masih belum berorientasi pasar	Tingginya permintaan produk pertanian
4.	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	Rendahnya pemanfaatan bahan baku pertanian untuk bioindustri dan bioenergi	Terbatasnya bahan baku bioenergi dan bioindustri yang tersedia	Tingginya permintaan pasar akan kebutuhan bahan baku untuk bio energi
4.	Peningkatan Pendapatan keluarga Petani	Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga petani	produktivitas lahan, inefisiensi tata niaga, lemahnya manajemen usahatani serta fluktuasi harga,	Tingginya permintaan pasar akan produk pertanian dan peternakan

3.3.2. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
“Terwujudnya Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang Modern, Berbudidaya Industri, Berbasis Pedesaan Dan Berdaya Saing”

Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat :

- 1) Meningkatkan fungsi manajemen pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang efektif
- 2) Meningkatkan produksi tanaman pangan dan Hortikultura secara berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan mutu, daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura .

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan masih belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang	Ketersediaan sarana produksi seperti benih bermutu dan pupuk masih sulit diperoleh oleh petani	Masih tersedianya lahan untuk pertanian dan agroklimat yang mendukung
2.	Meningkatkan produksi tanaman hortikultura	Produksi tanaman Hortikultura masih belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang	Ketersediaan sarana produksi seperti benih bermutu dan pupuk masih sulit diperoleh oleh petani	Masih tersedianya lahan untuk pertanian dan agroklimat yang mendukung
3.	Meningkatnya luas tanam dan luas panen tanaman pangan melalui intensifikasi	Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi pertanian	Lokasi tersebar tidak merata Perubahan iklim global dan serangan hama penyakit tanaman	Tersedianya lahan yang cukup luas
4.	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan yang berkualitas, aman untuk konsumsi melalui penggunaan benih unggul bermutu	Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan yang berkualitas, aman untuk konsumsi dan belum optimalnya penggunaan bibit unggul bermutu	Mahalnya harga sarana produksi Sarana dan tidak selalu tersedia dalam waktu dan jumlah dan kualitas yang di butuhkan petani	Tersedianya bibit unggul lokal dan bahan-bahan baku untuk pembuatan pupuk, dan pestisida organik
5.	Meningkatnya usaha agribisnis tanaman pangan yang berorientasi pasar melalui peningkatan mutu hasil/produk kepada on farm komoditas pangan	Kurangnya pelaku usaha agribisnis tanaman pangan yang berorientasi pasar	Petani masih belum berorientasi pasar, serta mahalnya biaya produksi	Terbukanya pasar bagi produk pertanian
6.	Terciptanya peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk hortikultura	Belum tersedianya bibit unggul dalam jumlah dan kualitas yang di perlukan	Potensi lahan yang cukup luas dan iklim yang mendukung
7.	Meningkatnya usaha agribisnis tanaman hortikultura yang berorientasi pasar	Kurangnya pelaku usaha agribisnis hortikultura yang berorientasi pasar	Petani masih belum berorientasi pasar, serta mahalnya biaya produksi	Terbukanya pasar bagi produk hortikultura

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Optimalnya pengelolaan lahan dan air	Belum optimalnya pengelolaan lahan dan air	Keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat	Potensi lahan yang besar dan tersedianya sumber air
9.	Berkembangnya penggunaan aspek sarana prasarana pertanian	Belum optimalnya penggunaan aspek sarana prasarana pertanian	Minimnya sarana dan prasarana pertanian	kebutuhan akan sarana dan prasarana pertanian
10.	Jumlah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Minimnya usaha yang bergerak pada industri pengolahan hasil pertanian	Ketersediaan bahan baku	Terbukanya pasar bagi produk pertanian
11.	Meningkatnya penerapan dan penyebaran informasi pasar produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Belum optimalnya penyebaran informasi pasar secara terbuka	Akses petani terhadap informasi pasar terbatas	Adanya media sebagai lembaga informasi publik

3.3.3. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

Visi Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat pada tahun 2014 -2018, yaitu ***"Mewujudkan tersedianya produk pangan , peternakan yang cukup dan berkualitas melalui pembangunan komodity aneka tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan yang tangguh"***.

Misi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyediakan Produk pangan utama yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas
2. Menyediakan pangan asal ternak yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas
3. Memberdayakan SDM Petani dan Peternakan untuk menghasilkan produk pertanian /peternakan yang berdaya saing tinggi dipasaran domestik maupun global.
4. Menciptakan peluang-peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menciptakan lapangan kerja agribisnis pertanian/peternakan
6. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparaturn Ketahanan pangan dan peternakan.
7. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pertanian dan peternakan.
8. Mengendalikan Penyakit hewan Menular Strategis (PHMS) guna menciptakan keamanan lingkungan budidaya ternak serta ketentraman dan kesehatan masyarakat.
9. Meningkatkan kapasitas UPT dalam rangka mendukung ketahanan dan keamanan pangan, pelayanan kesehatan hewan, penyediaan bibit dan pakan ternak.
10. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan , peternakan dan hasil olahannya
- 11.

Tabel 3.3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya populasi ternak.	Rendahnya populasi ternak	System budidaya konvensional	Ketersediaan Lahan, pakan alami dan layanan petugas
2.	Meningkatnya produksi dan produktifitas ternak.	Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak	System budidaya konvensional	Ketersediaan Lahan dan pakan alami
3.	Meningkatnya konsumsi produk peternakan yang berkualitas.	Rendahnya tingkat konsumsi produk peternakan yang berkualitas	Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah	Kebutuhan akan produk hewani semakin meningkat
4.	Meningkatnya pelayanan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.	Belum optimalnya pelayanan dibidang peternakan dan kesehatan hewan	Jangkauan pelayanan yang sangat luas serta Terbatasnya jumlah sarana prasarana serta petugas	Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan pelayanan prima
5.	Meningkatnya investasi dibidang peternakan.	Rendahnya investasi bidang peternakan	Minimnya Informasi tentang potensi investasi	Besarnya SDA
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.	Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.	Tingginya biaya produksi	Kebutuhan akan produk hewani semakin meningkat
7.	Terkendalnya penyakit hewan menular strategis.	Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis.	Jangkauan pelayanan yang sangat luas serta Terbatasnya jumlah sarana prasarana serta petugas	Kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari penyakit hewan tersebut
8.	Meningkatnya kualitas SDM peternakan dan kelembagaannya.	Rendahnya kualitas SDM peternakan dan kelembagaannya	Terbatasnya sumberdaya aparatur dan anggaran	Adanya Sumber daya kelembagaan
9.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna dibidang peternakan dan kesehatan hewan.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna dibidang peternakan dan kesehatan hewan.	Kualitas sumberdaya manusia dan penyebaran informasi dan aplikasi teknologi tepat guna	Minat peternak akan teknologi peternakan cukup tinggi
10.	Meningkatnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.	Belum optimalnya upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan	Rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan	Tersedianya aturan setempat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan , Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Meningkatnya PAD sub sektor peternakan.	Belum optimalnya PAD sub sektor peternakan	Rendahnya produktivitas sektor peternakan	Potensi sumberdaya alam yang tinggi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang kawasan untuk pertanian di Kabupaten Sintang diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi pangan daerah, dan menjaga kualitas lingkungan. Dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan pertanian dalam arti luas maka diupayakan suatu pendekatan melalui produk pengaturan yang berupa pedoman pengelolaan ruang. Hal ini perlu dilakukan agar para pelaku pembangunan dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk berbagai kegiatan yang berbasis kepada pertanian.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya yang akan diarahkan pengembangannya di Kabupaten Sintang sesuai dengan potensi yang ada adalah kawasan lindung dan budidaya.

Pola ruang yang terkait dengan pemanfaatan ruang untuk pembangunan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang mencakup:

- o Kawasan Pertanian Lahan Basah;
- o Kawasan Pertanian Lahan Kering;
- o Kawasan Peternakan
- o Kawasan Perikanan
- o Kawasan Perkebunan;
- o Kawasan Hutan Produksi;

Pengembangan kawasan budidaya pertanian ini dilakukan berdasarkan kesesuaian lahannya dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksisting. Pengembangan kawasan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan ini di wilayah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut ini.

a). Kawasan Pertanian Lahan Basah

Wilayah Kabupaten Sintang pada umumnya tidak sesuai untuk pengembangan pertanian lahan basah. Pengembangan pertanian lahan basah tersebar di Kecamatan Sepauk, Tempunak, Kayan Hilir, Sintang, Sei Tebelian, Ke lam Permai, Binjai, dan Ketungau Hilir.

b). Kawasan Pertanian Lahan Kering

Berdasarkan kemampuan lahannya, di Kabupaten Sintang terdapat kawasan yang sesuai untuk pengembangan pertanian lahan kering yang tersebar di semua kecamatan.

Beberapa hambatan utama dalam pembangunan pertanian terkait pengaturan ruang budidaya pertanian diantaranya, kesesuaian lahan, tanah yang sesuai untuk pengembangan komoditi tersebar atau tersebar dalam luasan yang kecil, konflik lahan dan konversi lahan peruntukan pertanian berubah menjadi areal perkebunan karet atau sawit.

- c) Kawasan peternakan
Berdasarkan kemampuan lahan kawasan peternakan masih dapat diintegrasikan dengan kawasan pertanian lahan kering dan perkebunan sawit
- d) Kawasan Perkebunan ; untuk pengembangan kawasan perkebunan rakyat masih dapat dikembangkan diseluruh kawasan dengan pemanfaatan lahan kering, lahan kritis dan lahan tidur,yang tidak diusahakan .

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2010-2020, maka ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang pada 5 tahun kedepan sebagai berikut:

1. Kecukupan produksi komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, sapi, cabai dan bawang merah) guna mengurangi ketergantungan dari luar Kabupaten.
2. Belum tercapainya sasaran produksi /masih rendahnya produksi pertanian bahan pangan utama (padi,jagung dan Kedele) serta Produksi Peternakan dan Produksi dalam periode satu tahun .
3. Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian peternakan dan perkebunan yang ramah lingkungan.
4. Penerapan Teknologi Budidaya (Pertanian,Peternakan dan Perkebunan) belum optimal.
5. Penanganan Pra dan Pasca Panen,pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian,peternakan dan perkebunan masih rendah.
6. Terbatasnya ketersediaan benih,bibit (Pertanian ,peternakan dan perkebunan) yang bersertifikat dan bermutu masih kurang.
7. Diversifikasi Pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu
8. Minimnya infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan hortikultura, ternak dan perkebunan.
9. Rendahnya akses pembiayaan dan pasar kepada petani dan peternak
10. Alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan besar swasta.
11. Belum optimalnya Penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
12. Minimnya sarana produksi, pengolahan hasil dan alat mesin pertanian
13. Pola pertanian, peternakan dan perkebunan konvensional
14. Peningkatan kualitas sumberdaya pertanian, peternakan dan perkebunan.
15. Pencegahan dan pengobatan penyakit tanaman dan hewan .
16. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya pertanian, peternakan dan perkebunan yang berkelanjutan.
17. Harga produk pertanian dan perkebunan tidak stabil .
18. Manajemen usaha tani (yang berwawasan agribisnis) belum dilaksanakan
19. Kurang optimalnya Pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Sintang.

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dan Misi

Visi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian hingga tahun 2021 adalah :

“ Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Tersedianya Produk Pertanian Pangan, Peternakan yang beragam dan sehat yang berbasis sumber daya lokal dan pedesaan dengan melestarikan sumberdaya alam, untuk kemandirian dan kedaulatan pangan “

Visi tersebut diatas mempunyai komponen pokok yang terkandung didalamnya yaitu :

1. Tercapainya kesejahteraan petani yang didapat dari peningkatan pendapatan ekonomi pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan.
2. Masyarakat Sejahtera yang tercukupi kebutuhan hidupnya serta hidup dalam lingkungan masyarakat yang aman dan damai.
3. Tersedianya aneka produk pangan utama yang sehat, dihasilkan dari produksi pertanian tanaman pangan, peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang .
4. Produksi pertanian tanaman pangan, peternakan yang dihasilkan berbasis pedesaan dan Pertanian Organik adalah Revitalisasi potensi sumberdaya lokal, pemanfaatan bahan organik.
5. Usaha sektor pertanian tanaman pangan, peternakan ini dengan memperhatikan kaedah – kaedah pelestarian sumber daya alam tanpa merusak ekosistem yang ada.
6. Terlaksananya pencapaian swasembada pangan, swasembada daging guna melaksanakan kemandirian dan kedaulatan pangan daerah.
7. Pengembangan Komoditi Perkebunan Rakyat dan Peternakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Penjelasan makna dari masing – masing komponen pokok yang terdapat dalam pernyataan visi tersebut diatas :

Dalam Visi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang ada 3 visi yang akan dicapai :

Visi 1. Swasembada Pangan : Misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan produksi, dan produktivitas pertanian, Peternakan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan diversifikasi pangan.

Visi 2. Masyarakat Sejahtera : Misi yang akan dilaksanakan adalah ;

1. Meningkatkan produktivitas budidaya pertanian, peternakan dan perkebunan rakyat persatuan unit usaha.
2. Meningkatkan mutu hasil pertanian, peternakan dan perkebunan Rakyat.
3. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pada berbagai tahapan usaha tani.
4. Meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian, peternakan dan perkebunan rakyat.

Visi 3. Produksi Pertanian yang beragam dan sehat :Misi yang akan dilaksanakan adalah ;

1. Malaksanakan diversifikasi usaha dibidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
2. Meningkatkan kualitas dan mutu produk pertanian, perkebunan dan peternakan yang aman,sehat dan utuh.
3. Mengembangkan potensi sumber daya alami dan teknologi spesifik lokal yang ramah lingkungan
4. Merevitalisasi lahan-lahan marginal dengan optimasi lahan pertanian
5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan manusia pertanian dalam mengembangkan pupuk organik berbasis kearifan local.

Tabel. 4.1
KETERKAITAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH KAB.SINTANG DENGAN
VISI DAN MISI SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG

<i>VISI KABUPATEN SINTANG 2017 - 2021</i>		<i>VISI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG 2017 - 2021</i>	
<i>MISI KABUPATEN SINTANG 2017 - 2021</i>		<i>MISI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG 2017- 2021</i>	
1.	Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal	1.	Melaksanakan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan,Peternakan dan Perkebunan Rakyat guna menyerap tenaga kerja dan mengembangkan ekonomi pedesaan untuk kesejahteraan petani
2.	Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	2.	Meningkatkan pendapatan petani dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura ,peternakan dan perkebunan rakyat dengan upaya peningkatan produksi
3.	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah	3.	Meningkatkan Produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura,Peternakan dan perkebunan rakyat dengan beragam produk pangan yang sehat dan berbasis sumber daya lokal dan pedesaan
4.	Meningkatkan Pemahaman ,penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial	4.	Melaksanakan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan,Peternakan dan Perkebunan rakyat dengan melestarikan sumber daya alam (tanpa merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
5.	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	5.	Melaksanakan swasembada pangan untuk kemandirian dan kedaulatan pangan daerah
6.	Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	6.	Melaksanakan manajemen Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

4.2.1 Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan daerah pertanian yang menghasilkan komoditas pangan dan terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat yang cukup setiap saat, sehat dan kelayakan gizi yang baik.
- b. Mewujudkan berkembangnya usaha pertanian, peternakan dan perkebunan rakyat yang produktif guna memperkuat ketahanan pangan daerah dan peningkatan kesejahteraan petani.
- c. Meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.
- d. Menumbuhkan daerah home industri, industri hilir dan hulu produk pertanian pangan, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan produk olahan .
- e. Menumbuhkan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku pupuk dan pestisida organik dan sebagai sumber energi bio gas .

4.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan pertanian Kabupaten Sintang berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik.
- b. Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat.
- c. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan.
- d. Meningkatnya berbagai produk pertanian, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing .
- e. Revitalisasi kelembagaan petani.
- f. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sintang melalui PAD maupun pertumbuhan PDRB.
- g. Tumbuhnya daerah home industri pengolahan bahan pangan.
- h. Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani.
- i. Meningkatnya sumberdaya manusia pelaku pertanian.
- j. Termanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain.
- k. Mengembangkan aneka komodity Perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan PDRB Kab.Sintang.
- l. Meningkatkan Populasi ternak guna memenuhi kebutuhan daging terutama daging sapi agar ketergantungan daging impor dapat dikurangi/ditiadakan.
- m. Mencegah, mengurangi dan mengendalikan perkembangan dan serangan hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Sintang ditujukan kepada Revitalisasi, ada beberapa Revitalisasi pokok yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi lahan Pertanian.
2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan.
3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.
4. Revitalisasi sumber daya manusia.
5. Revitalisasi kelembagaan petani.
6. Revitalisasi Teknolgi budidaya pertanian pangan, perkebunan dan peternakan.
7. Revitalisasi tekhnologi dan industri hulu dan hilir.

Dari 7 Strategi revitalisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Revitalisasi lahan Pertanian

Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan. Yang berkenaan dengan lahan ini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan antara lain :

❖ *Ketersediaan Lahan :*

Ketersediaan lahan pertanian harus dipertahankan untuk jangka panjang, untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian upaya yang dilakukan:

- Menindak lanjuti Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan untuk melindungi dan mengatur konversi lahan pertanian .
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar.
- Membangun data base yang akurat berisi ketersediaan dan keberadaan lahan secara geografis dan peruntukannya sebagai sub sektor pertanian pangan .

❖ *Kesuburan Lahan :*

Untuk mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal maka upaya yang dilakukan:

- Melakukan koordinasi lintas sektor untuk penanaman pohon dikawasan aliran sungai dan daerah kritis.
- Mendorong petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, dengan menerapkan penggunaan pupuk organik dan praktek budidaya pertanian yang tepat.

❖ *Kepemilikan dan Status Lahan :*

Kepemilikan dan status lahan merupakan aspeknon teknis yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan lahan pertanian. Ketidak jelasan

kepemilikan dan status lahan sangat berpengaruh dalam investasi dalam bidang pertanian ; upaya yang akan dilakukan al :

- Membantu petani dalam mengupayakan pensertifikasian lahan .

❖ *Ketersediaan Air Pertanian:*

Penggunaan air di sektor pertanian sangatlah menentukan untuk itu upaya yang akan dilaksanakan al :

- Memperbaiki jaringan irigasi
- Memperbaiki struktur fisik tanah dengan penamabahan bahan organik
- Membuat dam-dam kecil serta embung
- Mengatur jadwal tanam
- Mencari teknologi budidaya varietas tahan kekeringan dan hemat air

b) Revitalisasi perbenihan dan perbibitan

Untuk mewujudkan swasembada pangan daerah dan mempertahankan swasembada pangan Nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani maka perangkat perbenihan/perbibitan harus kuat; dan untuk memperbaiki perangkat perbenihan/perbibitan upaya yang perlu dilakukan al:

- Menata kelembagaan perbenihan/perbibitan yang telah ada dan menumbuhkan yang baru.
- Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetic nasional untuk pengembangan varietas unggul local.
- Mendorong sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pengembangan bibit/benih.
- Membentuk penangkar-penangkar benih unggul di tingkat lapangan.
- Memperbanyak sumber-sumber bibit unggul baik dari sumber lokal maupun luar.
-

c) Revitalisasi Infrastruktur dan sarana ;

Untuk meningkatkan efisiensi usaha tani perlu dilakukan hala-hal sbb :

- Membuat jalan usaha tani.
- Pembukaan lahan usaha tani baru baik lahan kering maupun lahan basah (sawah)/ ekstensifikasi lahan.
- Memberikan, penyediaan dan pelayanan alat mesin pertanian.
- Membuat dan merehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa (jides),Jaringan usaha tani (Jitut) dan infrastruktur lainnya.

d) Revitalisasi Kelembagaan Petani ;

Untuk mempermudah koordinasi, pembinaan dan bimbingan maka diperlukan kelembagaan petani, agar petani dapat mengakses informasi , maka diperlukan upaya-upaya :

- Berkoordinasi untuk Membentuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

- Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budaya maupun dalam aspek pemasaran.
- Memperkuat modal usaha bagi kelompok melalui pemberian bantuan modal dan stimulus.

e) Revitalisasi Sumber Daya Manusia ;

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital karena sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, tanpa pelaku yang handal dan berkompeten maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal; untuk itu upaya –upaya yang akan dilakukan :

- Pelatihan
- Magang
- Sekolah Lapang

f) Revitalisasi Teknologi Industri Hulu dan Hilir ;

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah :

- Meningkatkan penelitian/percobaan dan kaji terap khusus dalam bidang inovasi benih, bibit, pupuk, obat hewan, perkebunan dan tanaman pangan, alsintan dan produk olahan serta pemanfaatan sumber daya lahan dan air .
- Mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) di pedesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar.
- Meningkatkan jaminan informasi pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian pangan, peternakan dan perkebunan.
- Meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari hulu sampai hilir .

g) Revitalisasi Teknolgi budidaya pertanian pangan, perkebunan dan peternakan.

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan pertanian diperlukan adanya perbaikan dan penerapan inovasi teknologi budidaya baru yang dianjurkan sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas yang diharapkan :

Hala –hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

- Adopsi dan aplikasi teknologi terbaru sesuai anjuran dalam hal budidaya pertanian (pangan ,perkebunan) dan peternakan .
- Penyampaian dan Penyebaran informasi pertanian kepada para petani melalui jaringan media elektronik secara luas.
- Bimbingan dan pendampingan dalam aplikasi budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan oleh penyuluh pertanian lapangan .

4.3.2 Kebijakan

Terdapat 4 (empat) kebijakan pokok pembangunan pertanian Kabupaten Sintang yaitu:

1. ***Kebijakan meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, dengan arah kebijakan sebagai berikut:***
 - a. Meningkatkan produksi pertanian baik kuantitas maupun kualitas;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dalam mendukung ekonomi dan menjaga kelestariannya;
 - c. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis;
 - d. Menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, misalnya dorongan untuk peningkatan pasca panen dan produk olahan pertanian, sistem standar mutu dan keamanan pangan.
 - e. Menguatkan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri;
 - f. Meningkatkan diversifikasi usahatani dan ekstensifikasi lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan terbiar (lahan tidur).
 - g. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan dengan memperhatikan aspek agroekosistem dan budaya lokal.
 - h. Meningkatkan produksi beras, daging, dan telur di Kabupaten Sintang sehingga dapat berswasembada pangan,.
 - i. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.
 - j. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun-tahun sebelumnya antara lain bantuan benih/ bibit unggul, alsintan, SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan dilanjutkan dengan GPTT (Gerakan pengelolaan Tanaman Terpadu).
2. ***Kebijakan meningkatkan kemampuan petani serta penguatan lembaga pendukungnya, dengan arah kebijakan sebagai berikut,***
 - a. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi,
 - b. Membangun *delivery* sistem dukungan pemerintah untuk sektor pertanian dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani.
3. ***Kebijakan mengamankan ketahanan pangan, dengan arah kebijakan sebagai berikut.***
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi desa, embung, jalan usaha tani dll.
 - b. Meningkatkan ketersediaan pangan Kabupaten Sintang dari produksi padi/beras, ternak dan ikan.

- c. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras diarahkan dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat, untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif.
- d. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.
- e. Penelitian dan pengembangan berbasis sumber daya spesifik lokasi dan sesuai agro ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.

4. ***Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan arah kebijakan sebagai berikut :***

- a. Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan.
- b. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan bunga rendah.
- c. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.
- d. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energy masyarakat khususnya di pedesaan dan mensubstitusi BBM.
- e. Pengembangan industri hilir pertanian dipedesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan.

Tabel 4.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	<i>“ Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Tersedianya Produk Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan yang beragam dan sehat yang berbasis sumber daya lokal dan pedesaan dengan melestarikan sumber daya alam, untuk kemandirian dan kedaulatan pangan “</i>		
MISI : I	<i>Meningkatkan produksi, dan produktivitas pertanian, Peternakan dan Perkebunan yang berkelanjutan.</i>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
TUJUAN .I			
Mewujudkan daerah pertanian yang menghasilkan komoditas pangan dan terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat yang cukup setiap saat, sehat dan kelayakan gizi yang baik.	1. Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
MISI : II	<i>Meningkatkan diversifikasi pangan</i>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
TUJUAN .II			
Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman palawija khususnya jagung, kedelai	1. Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
MISI : III	<i>Meningkatkan produktivitas budidaya pertanian peternakan dan perkebunan persatuan unit usaha</i>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
TUJUAN .III			
Mewujudkan Peningkatan Produktivitas komodity pangan, ternak dan perkebunan rakyat	1. Terlaksananya Peningkatan Produktivitas komodity padi, jagung, kedelai, daging dan komodity perkebunan rakya	1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
MISI : IV	<i>Malaksanakan diversifikasi usaha dibidang tanaman pangan, peternakan dan perkebunan</i>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
TUJUAN .IV			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.	1. Meningkatnya berbagai produk pertanian (Pangan, ternak dan perkebunan rakyat) yang memiliki nilai tambah dan daya saing . 2 Meningkatkan Manajemen Usaha Tani.	1. Revitalisasi teknologi dan industri hilir 2. Revitalisasi kelembagaan petani	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan. 2. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis
			3. Pengembangan industri hilir pertanian dipedesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan
MISI : V	Mengembangkan potensi sumber daya alami dan teknologi spesifik lokal yang ramah lingkungan		
TUJUAN .V			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menumbuhkan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku pupuk dan pestisida organik dan sebagai sumber energi bio gas	Pemanfaatan limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain.	1. Revitalisasi teknologi dan industri hilir 2. Revitalisasi sumber daya manusia.	1. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energy masyarakat khususnya di pedesaan dan mensubsstitusi BBM. 2. Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan prioritas program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang didasarkan atas perpaduan antara arahan kebijakan nasional/pusat (*top down policy*) dalam hal ini Kementerian Pertanian dan penyusunan rencana dari bawah (*bottom up planing*). Rencana disusun dengan mengacu pada sasaran yang jelas meliputi besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, manfaat dan dampak bagi kelompok sasaran.

Program dan Kegiatan disusun dengan kondisi awal, sumber daya alam, manusia, modal, teknologi, kondisi internal dan eksternal, peraturan perundang – undangan, perkembangan, keterbatasan peran dan kewenangan, tahapan pembangunan yang telah dicapai dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 – 2021:

TABEL. 5.1
MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
URUSAN WAJIB																							
PERTANIAN																							
Mewujudkan daerah pertanian yang menghasilkan komoditas pangan dan terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat yang cukup setiap saat, sehat dan kelayakan gizi yang baik.	Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	Revitalisasi lahan Pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Pemanfaatan Lahan Pertanian secara optimal	2.01.01.16	Kegiatan : Pengelolaan Lahan dan Air	Lahan pertanian yang tersedia dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan secara optimal (outcomes) =1 Kegt (output)	1 kegiatan	1 kegiatan	20.975.000.000	1 kegiatan	pm	1 kegiatan	DPPP									
		Revitalisasi perbenihan dan perbibitan.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura	2.01.01.19	Program peningkatan produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan Berkelanjutan.	Terlaksananya Peningkatan hasil Produksi ,Produktivitas dan mutu produk Pertanian tanaman pangan.	3 kegiatan		11.215.325.600		11.221.497.201		12.336.500.000		14.285.884.000		15.751.359.800		17.367.496.495		DPPP	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
									2016		2017		2018		2019		2020					2021				
									TARGET	RP				TARGET	RP											
		Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian	Meningkatkan Produksi Pertanian,Peternakan dan Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana penyuluh perikanan		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Terlaksananya pengembangan sistem Penyuluhan perikanan		151.800																	
		Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian	Meningkatkan Produksi Pertanian,Peternakan dan Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Penyuluh Perikanan		Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana penyuluh perikanan.	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana penyuluh perikanan.	1 pkt	1 pkt	151.800	1 pkt		1 pkt													
		Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian,Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Optimalisasi Produksi Perikanan		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		145.381.100		145.500.000		160.050.000		176.055.000		193.660.500		213.026.550							
Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman palawija khususnya jagung,kedelai	terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	Revitalisasi lahan Pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian,Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya Hasil Produksi, Padi,Jagung dan Palawija Lainnya	2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya kualitas Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Padi : 24,99 Kw/ha , Jagung : 29,61 kw/ha dan Palawija : 11,43 Kw/ha	Padi : 25,60 kw/ha , jagung : 29,81 kw/ha dan Palawija : 11,50 Kw/ha	34.381.536	Padi : 26,50 Kw/ha , Jagung : 29,71 kw/ha dan Palawija : 11,50 Kw/ha	465.220.600	Padi : 27,00 Kw/ha , Jagung : 29,81 kw/ha dan Palawija : 11,55 Kw/ha	548.000.000	Padi : 27,50 Kw/ha , Jagung : 29,90 kw/ha dan Palawija : 11,75 Kw/ha	565.000.000	Padi : 30,00 Kw/ha , Jagung : 30,00 kw/ha dan Palawija : 12,00 Kw/ha	585.000.000	Padi : 35,50 Kw/ha , Jagung : 32,00 kw/ha dan Palawija : 12,10 Kw/ha	602.500.000	Padi : 35,50 Kw/ha , Jagung : 32,00 kw/ha dan Palawija : 12,10 Kw/ha		DPPP			
		Revitalisasi lahan Pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian,Peternakan dan Perkebunan.	Tersedianya data Produksi,provitas dan luas panen padi,jagung dan palawija.		Kegiatan : Penyusunan Angka Ramalan (ARAM) Produksi Padi dan Palawija	Terlaksananya Penyusunan angka Ramalan Produksi,Provitas dan Luas Penen Tanaman Bahan Pangan Utama (Outcomes); 1 Kegt (output).	1 kegiatan	1 kegiatan	130.778.000	1 kegiatan	130.000.000	1 kegiatan	135.000.000	1 kegiatan	140.000.000	1 kegiatan	145.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	DPPP		
		Revitalisasi perbenihan dan perbibitan.	Meningkatkan Produksi Pertanian,Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya Tanaman Padi,Palawija		Kegiatan : Peningkatan Produksi,Provitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan.	Terlaksananya Peningkatan hasil Produksi Produktivitas dan mutu produk tanaman padi,palawija (out comes) , 1 kegt (output).	Sumber Pengairan : 197 unt, Jaringan Pengairan: 1.327 ha dan Jalan Usaha Tani 46 km	77 paket	11.061.460.000	180 paket	11.061.480.000	180 paket	12.251.500.000	7180 paket	14.125.000.000	180 paket	15.578.887.800	180 paket	17.182.777.495	Sumber Pengairan : 697 unt, Jaringan Pengairan: 2.327 ha dan Jalan Usaha Tani 246 km		DPPP			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									2016		2017		2018		2019		2020					2021	
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP
Mewujudkan Peningkatan Produktivitas komodity pangan, ternak dan perkebunan rakyat	Terlaksananya Peningkatan Produktivitas komodity padi, jagung, kedelai, daging dan komodity perkebunan rakyat	Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura		Kegiatan Pengembangan Hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Hortikultura	3 Kecamatan	200 batang	104.403.100	250 batang	110.017.200,50	300 batang	85.000.000	400 batang	95.000.000	450 batang	100.000.000	500 batang	105.000.000	2.100 batang	DPPP	
		Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Tersedianya data untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan baru.		Kegiatan : Penyusunan Data Base SID (Survey Investigasi Disign) untuk pengembangan areal pertanian Tanaman Pangan .	Terlaksananya Penyusunan Data Base SID untuk pengembangan areal pertanian tanaman pangan.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.462.500	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	59.895.000	1 kegiatan	65.884.000	1 kegiatan	72.472.000	1 kegiatan	79.719.000	1 kegiatan	DPPP	
		Revitalisasi perbenihan dan perbibitan.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya penangkaran Benih Baru		Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Penangkaran Benih Tanaman Pangan .	Terlaksananya Penumbuhan penangkaran Benih Baru dan Tersedianya Benih untuk petani yang membutuhkan nya.	1 Kecamatan	1 Kecamatan	32.030.300	1 Kecamatan	32.000.000	1 Kecamatan	38.720.000	1 Kecamatan	42.592.000	1 Kecamatan	46.851.000	1 Kecamatan	51.536.000	6 Kecamatan	DPPP	
		Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terkendalnya penyakit ternak.		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terelaksananya Pengendalian Penyakit Ternak			538.911.755		540.000.000		594.000.000		653.400.000		718.740.000		790.614.000			

		Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Rabies.		Kegiatan : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies	Terlaksananya Pencegahan Penularan dan Penyebaran Penyakit Rabies.	2.000 Dosis	1 kegiatan	349.381.755	1 kegiatan	350.000.000	1 kegiatan	385.000.000	1 kegiatan	423.500.000	1 kegiatan	465.850.000	1 kegiatan	512.435.000		
		Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengendalian Penyakit Menular Ternak.		Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.	2.500 ekor	1 kegiatan	189.530.000	1 kegiatan	190.000.000	1 kegiatan	209.000.000	1 kegiatan	229.900.000	1 kegiatan	252.890.000	1 kegiatan	278.179.000		
		Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular strategis secara terpadu		Kegiatan : Pengendalian Penyakit Hewan menular strategis secara terpadu.	Terlaksananya Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis secara terpadu.	2.000 ekor	2.500 ekor		5.000 ekor											
		Revitalisasi perbibitan dan perbibitan.	Meningkatkan Produksi Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya Produksi Peternakan	2.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Terlaksananya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan			747.744.676		125.000.000		137.500.000		151.250.000		166.375.000		183.012.500		
		Revitalisasi perbibitan dan perbibitan.	Meningkatkan Produksi Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Penyaluran Bibit Ternak Pada Masyarakat.		Kegiatan : Pendistribusian Bibit Ternak Pada Masyarakat	Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak Pada Masyarakat.	86 ekor	136 ekor	553.545.500	1.000 ekor	125.000.000	1.000 ekor	137.500.000	1.000 ekor	151.250.000	1.000 ekor	166.375.000	1.000 ekor	183.012.500		
		Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Pengamanan Pangan produk asal hewan.	4.	Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan Pangan Produk asal Hewan			1.260.000.000		1.260.000.000		1.500.000.000		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		

		Revisitas perbenihan dan perbibitan.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Pengembangan Bibit Ternak		Kegiatan : Pengembangan Pembibitan Ternak.	Terlaksananya Pengembangan Pembibitan Ternak	0	0	0											
		Revisitasi Infrastruktur dan sarana pertanian	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya pengembangan sumber daya perikanan budidaya		Program Pengelolaan dan Pengembangan sumber daya Perikanan Budidaya	Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan budidaya			10.844.560.600		4.353.980.000		4.994.926.720		4.816.288.892		5.297.917.781		5.827.709.559	
		Revisitasi Infrastruktur dan sarana pertanian	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Tersedianya Sarana dan prasarana perikanan budidaya		Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan Sarana/Prasarana Perikanan Budidaya.	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana perikanan budidaya	1.079 unit	1.079 unit	10.598.980.000	600 unit	4.353.980.000,	600 unit	4.724.876.720	600. unit	4.519.233.892	600. unit	4.971.157.281	600 unit	5.468.273.009	
		Revisitasi perbenihan dan perbibitan	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pengembangan Perikanan Tangkap														
		Revisitasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan			Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	0	0	0	3 klpk	0		0		0		0		0	
		Revisitasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	Tersedianya Dokumen hasil survey perencanaan pengembangan kawasan perikanan		Program : Perencanaan pengembangan Perikanan	Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar														
		Revisitasi lahan Pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya pengembangan perikanan		Kegiatan : pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Terlaksananya pengembangan kawasan perikanan .	0	0	0	12 Danau										
		Revisitasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	Terlaksananya pengawasan wilayah kawasan sumber daya perikanan		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan														

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
									2016		2017		2018		2019		2020					2021		
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	
Meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.	Meningkatnya berbagai produk pertanian (Pangan, ternak dan perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah dan bersaing .	Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terkendalinya Serangan OPT pada Tanaman Pangan Utama	2.01.01.16	Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rendahnya Tingkat Kegagalan Panen pada Tanaman Bahan Pangan Utama . = 1 Kegiatan (Output).	1 kegiatan	1 kegiatan	44.151.500	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	48.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	57.500.000	1 kegiatan	DPPP		
		Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya peningkatan pemasaran produksi pertanian.		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian .			0														
		Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya peningkatan pemasaran produksi pertanian Pangan dan Hortikultura		Kegiatan : Pameran, Promosi dan Ekspose Produksi Hasil Pertanian.	Terlaksananya Pameran, Promosi dan Ekspose Paroduksi Hasil Pertanian.			0	1 Kegiatan	0	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan							
		Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Tersedianya sarana dan prasarana pertanian untuk tanaman pangan dan hortikultura	2.01.01.18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pangan dan Hortikultura																	

	Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Tersedianya alat mesin pertanian untuk tanaman pangan dan hortikultura		Kegiatan : Pengadaan Alsintan	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian untuk Mekanisasi Pertanian.	48 unit	12 unit												
	Revitalisasi kelembagaan petani	Meningkatkan Produksi Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Ternak		Kegiatan : Pendataan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Peternakan	Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Peternakan	0	1. paket												
	Revitalisasi kelembagaan petani	Meningkatkan Produksi Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Pakan Ternak		Kegiatan : Pengembangan Bahan Pakan Ternak Lokal.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Pakan Ternak Lokal.	0	1. paket	1. paket	1. paket										
	Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana		Kegiatan : Pembangunan Kios Daging, RPH Ruminansia dan Peralatannya.	Terlaksananya Pembangunan Kios Daging, RPH Ruminansia dan Peralatannya.	1 paket	1 paket	1.260.000.000	1 paket	1.260.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.650.000.000	1 paket	1.815.000.000	1 paket	1.996.500.000	1 paket
	Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya Peningkatan usaha dibidang peternakan		Program Bina Usaha dan Produksi Peternakan	Terlaksananya Bina Usaha Produksi Peternakan					85.000.000		93.500.000		102.850.000		113.135.000		124.448.500	
	Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kelompok		Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Peternakan	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kelompok	0	0	0											

		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Peningkatan SDM Peternakan		Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDM Peternakan	Terlaksananya Peningkatan SDM Peternakan	0	0	0											
		Revitalisasi kelembagaan petani	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Pengembangan UPR		Kegiatan : Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)/Kelompok Hetchery skala rumah tangga.	Terlaksananya Pengembangan UPR	15 pakt	15 pakt	269.000	15 pakt										
		Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Tersedianya data statistik perikanan		Kegiatan : Pengadaan Sarana Statistik Perikanan .	Tersedianya data statistik perikanan	0	0	0	3 lap										
		Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya Perberdayaan Masyarakat		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan Perikanan .	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan Perikanan .														
		Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya Pembentukan/Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Kawasan Perikanan		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan .	Terlaksananya Pengawasan sumber daya perikanan	0	0	0	3 klpk										
		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan		Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran produk Perikanan	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran produk Perikanan	4 pkt	4 pkt	145.381.100	1 kgt	145.500.000	1 kgt	160.050.000	1 kgt	176.055.000	1 kgt	193.660.500	1 kgt	213.026.550	

		Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis		2.01.2.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			995.087.200,00	100%	839.020.000,00	100%	923.118.500,00		1.015.043.150,00							
Meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.	Meningkatkan Manajemen Usaha Tani.	Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Penyaluran pupuk bersubsidi dapat termonitor tepat waktu dan sasaran penerimanya		Kegiatan : Pengawasan Kebijakan Subsidi Pertanian	Peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan perencanaan yang disusun (outcomes) = 1 kegt (output)	1 kegiatan	1 kegiatan	249.999.200	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	270.000.000	1 kegiatan	275.000.000	1 kegiatan	280.000.000	1 kegiatan	85.000.000	1 kegiatan	DPPP
		Revitalisasi kelembagaan petani	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Tersedianya data Realisasi outcomes dan output yang dilaksanakan.	2.01.01.16	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya evaluasi seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan (outcomes). = 1 Kegt (output)	1 kegiatan	1 kegiatan	90.220.599,5	1 kegiatan	90.220.599,5	1 kegiatan	95.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	105.000.000	1 kegiatan	110.000.000	1 kegiatan	DPPP
		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.	Terlaksananya Penerapan Teknologi peternakan	3.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi peternakan (adopsi teknologi)			97.099.588		173.274.800		190.602.280		209.662.508		230.628.759		253.691.635		
		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya Inseminasi Buatan		Kegiatan : Optimalisasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan	Terlaksananya Inseminasi Buatan	1 kegiatan	41 kali	97.099.588	45 kali	98.000.000	50 kali	107.800.000	55 kali	118.580.000	60 kali	130.438.000	60 kali	143.481.800		
		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya Inseminasi Buatan		Kegiatan : Optimalisasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan	Terlaksananya Inseminasi Buatan	1 kegt	41 kali	97.099.588	45 kali	98.000.000	50 kali	107.800.000	55 kali	118.580.000	60 kali	130.438.000	60 kali	143.481.800		

		Revitalisasi kelembagaan petani	Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengankonsep pengembangan agribisnis	Terlaksananya Layanan Informasi dan promosi		Kegiatan : Peningkatan akses terhadap pasar melalui penyediaan informasi pasar dan layanan promosi	Terlaksananya Layanan Informasi dan promosi	0	0	0	1 kegiatan	85.000.000	1 kegiatan	93.500.000	1 kegiatan	102.850.000	1 kegiatan	113.135.000	1 kegiatan	124.448.500		
Menumbuhkan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku pupuk dan pestisida organik dan sebagai sumber energi bio gas	Pemanfaatan limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain lain	Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di pedesaan dan mendistribusian BBM	Dilaksanakannya adopsi teknologi oleh para petani		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Peningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian oleh Petani (Adopsi Teknologi Pertanian).	2 Kegiatan	2 Kegiatan	68.572.600	2 Kegiatan	70.000.000	2 Kegiatan	88.885.000	2 Kegiatan	97.773.500	2 Kegiatan	107.550.650	2 Kegiatan	118.305.000	2 Kegiatan	DPPP
		Revitalisasi sumberdaya manusia	Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan	Dilaksanakannya Pertanian Organik dan Teknologi Lainnya oleh Petani.		Kegiatan :Bimbingan dan Pendampingan Penerapan Teknologi Pertanian (Pertanian Organik dan Teknologi Lainnya).	Terlaksananya bimbingan dan pendampingan penerapan teknologi kepada petani.	1 kelompok : 5 ha	1 kelompok : 5 ha	36.542.300	1 kelompok : 5 ha	38.000.000	1 kelompok : 5 ha	50.165.000	1 kelompok : 5 ha	55.181.500	1 kelompok : 5 ha	60.699.650	1 kelompok : 5 ha	66.769.000	5 kelompok : 25 ha	DPPP
		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di pedesaan dan mendistribusian BBM	Terlaksananya pemanfaatan limbah hasil peternakan.		Kegiatan : Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik dan BIO GAS	Terlaksananya Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik dan Bio Gas	0	0	0	20 klp	75.274.800	20 klp	82.802.280	20 klp	91.082.508	20 klp	100.190.759	20 klp	110.209.835		
		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan	Terlaksananya TOT Peternakan		Kegiatan : Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi	0	0	0	5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang			

		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di pedesaan dan mendistribusian BBM.	Tersedianya Sarana dan prasarana BBI Lokal		Kegiatan : Pengembangan Balai Benih Lokal (BBI).	Terlaksananya Pengembangan Balai Benih Ikan Lokal.	2 pkt	2 pkt	245.311.600	1 pkt	245.500.000	1 pkt	270.050.000	1 pkt	297.055.000	1 pkt	326.760.500	1 pkt	359.436.550
		Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di pedesaan dan mendistribusian BBM..	Tersedianya Sarana dan prasarana PBI Nenak		Kegiatan : Pengadaan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana PBI Nenak	Terlaksananya Pengadaan /Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan .	0	0	0	1 pkt									
				Terlaksananya jasa pelayanann surat menyurat	2.01.2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan lancar	1 Kegt	1 Kegt	3.117,500	100%	3.200.000,00	100%	3.520.000	100%	3.872.000	100%	3.872.000	100%	4.259.200
				Terlaksananya jasa pelayanan telekomunikasi,air dan listrik	2.01.2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1 Kegt	1 Kegt	80.400	100%	81.000.000,00	100%	89.100.000	100%	98.010.000	100%	107.811.000	100%	118.592.100
				Terlaksananya jasa pelayanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /oerasinal	2.01.2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1 Kegt	1 Kegt	14.800	100%	15.000.000,00	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	21.961.500
				Terlaksananya pengadaan ATK dan perlengkapan Komputer	2.01.2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK dan Perlengkapan Komputer yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1 Kegt	1 Kegt	45.836,28	100%	46.000.000,00	100%	50.600.000	100%	55.660.000	100%	61.226.000	100%	67.348.600

				Terlaksananya pengadaan barang /surat cetakan	2.01.2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang pelayanan administrasi kantor	1 Kegt	1 Kegt	21.234,00	100%	22.600.000,00	100%	24.860.000	100%	27.346.000	100%	30.080.600	100%	33.088.660		
				Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik	2.01.2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik yang Dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegt	1 Kegt	2.457,30	100%	2.500.000,00	100%	2.750.000	100%	3.025.000	100%	3.327.500	100%	3.660.250		
				Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan perUndang - Undang-an	2.01.2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah yang Dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegt	1 Kegt	8.340,00	100%	8.700.000,00	100%	9.570.000	100%	10.725.000	100%	11.797.500	100%	12.977.250		
				Terlaksananya pengadaan makan dan minum rapat Dinas	2.01.2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1 Kegt	1 Kegt	27.619,40	100%	14.190.000,00	100%	15.609.000	100%	17.169.000	100%	18.885.900	100%	20.774.490		
				Terlaksananya rapat-rapat keluar daerah	2.01.2.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1 Kegt	1 Kegt	439.750,00	100%	441.542.200,00	100%	485.696.000	100%	534.265.000	100%	587.691.500	100%	646.460.650		
				Terlaksananya Penyediaan tenaga pendukung administrasi perkantoran	2.01.2.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga honorer yang menunjang Pelayanan Administrasi/Keamanan/Super Perkantoran	1 Kegt	1 Kegt	77.400,00	100%	78.000.000,00	100%	85.800.000	100%	94.380.000	100%	103.818.000	100%	114.199.800		

				Sarana SKPD DPPP	2.01.2.01.01.01.22	Peringatan Hari Besar Nasional	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional	1 Kept	1 Kept	9.289,19	100%	10.000.000,00	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.641.000		
				Sarana SKPD DPPP	2.01.2.01.01.01.25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan Kantor yang dapat mendukung kegiatan rutin kantor secara efektif	1 Kept	1 Kept	4.524,039	100%	4.665.000,00	100%	5.131.000	100%	5.644.100	100%	6.208.510	100%	6.829.361		
				Sarana/prasarana Pameran Pembangunan	2.01.2.01.01.01.28	Pameran Pembangunan	Terselenggaranya Pameran Pembangunan	1 Kept	1 Kept	32.032,47	100%	35.000.000,00	100%	3.850.000	100%	4.235.000	100%	4.658.500	100%	5.124.350		
				Materi Rapat, Bimbingan dan Koordinasi	2.01.2.01.01.01.31	Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1 Kept	1 Kept	208.495,000	100%	223.190.000,00	100%	24.629.000	100%	27.091.900	100%	29.801.090	100%	32.781.199		
				Pelaksanaan operasional SKPD	2.01.2.01.01.01.47	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas yang dapat menunjang Tugas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kept	1 Kept	9.470,00	100%	9.500.000,00	100%	10.405.000	100%	11.445.500	100%	12.590.050	100%	13.849.055		
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				204.180.200,00		119.630.000,00		131.593.000,00		144.752.300,00		159.277.530,00				
				Kendaraan Dinas Operasional	2.01.2.01.01.02.05.001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional	1 Kept	1 Kept		100%											

				Peralatan Kantor	2.01.2.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan kantor dengan baik sehingga ruangan kantor lebih indah.	1 Kegt	1 Kegt	21.000.000	100%	2.975.000,00	100%	3.272.000	100%	3.599.200	100%	3.959.120	100%	4.355.032
				Kendaraan Dinas Operasional	2.01.2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional yang dapat menunjang kelancaran tugas.	1 Kegt	1 Kegt	62.850.000	100%	65.000.000,00	100%	71.500.000	100%	78.650.000	100%	86.515.000	100%	95.166.500
				Perlengkapan kantor	2.01.2.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Aparatur	1 Kegt	1 Kegt	4.800.000	100%	5.280.000,00	100%	5.808.000	100%	6.388.800	100%	7.027.680	100%	7.730.448
				Peralatan Gedung	2.01.2.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Aparatur	1 Kegt	1 Kegt	4.250.000	100%	5.500.000,00	100%	6.050.000	100%	6.655.000	100%	7.320.500	100%	8.052.550
				Perangkat Komputer	2.01.2.01.01.02.56	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Tersediannya Perangkat Komputer dan printer untuk menunjang kinerja aparatur	1 Kegt	1 Kegt	3.300.400	100%	15.000.000,00	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	21.961.500
				Penambahan Aset		Pengadaan Meubelair						95.425.200,00								
					2.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				74.800.000,00		82.280.000,00		90.508.000,00		99.558.800,00		109.514.680,00		

				Disiplin ASN	2.01.03.05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari tertentu	1 Kegt	1 Kegt	68.000.000		74.800.000,00	82.280.000,00		90.508.000,00		99.558.800,00		109.514.680,00	
					2.01.2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				150.000.000,00		165.000.000,00	181.500.000,00		199.650.000		219.615.000,00			
				Peningkatan SDM ASN DPPP	2.01.2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti diklat yang dapat menunjang tugas dan fungsi aparatur	1 Kegt	1 Kegt	179.370	100%	150.000.000,00	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000
					2.01.2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN				12.000.000,00		13.200.000,00	14.520.000,00		15.972.000		17.569.200,00			
				Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	2.01.2.01.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun untuk Penyusunan pelaporan keuangan .	1 Kegt	1 Kegt	11.999,845	100%	12.000.000,00	100%	13.200.000	100%	14.520.000	100%	15.972.000	100%	17.569.200
				JUMLAH TOTAL						47.675.929.462,50	19.875.540.000,00	21.863.094.000,00	24.049.403.400,00	26.454.343.740,00	29.099.778.114,00					

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera didukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada Tahun 2021, maka perlu disusun penetapan indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan SKPD. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian. Indikator kinerja dinas pertanian dan perkebunan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel 6.1 berikut:

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Produksi Padi (Ton)	74.396	75.885	78.162	80.898	83.729	87.078	93.608	93.608
2.	Produksi Jagung (Ton)	962	2.924	3.073	3.158	3.960	3.449	2.943	2.943
3.	Produktivitas padi (Kw/Ha)	24,99	25,60	26,50	27,00	27,50	30,00	35,50	35,50
4.	Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	29,61	29,71	29,71	29,81	29,90	30,00	32,00	32,00
5.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	26,46	26,96	27,45	27,94	28,43	28,93	29,43	29,42
6.	Produksi peternakan (daging) (Ton)	3714	4.100	4.300	4.550	4.712	4.960	4.974	4.974
7.	Produksi perkebunan (Ton)								
a.	Komoditi Karet (Ton)	47.129,36	51.842	57.027	62.729	69.002	75.902	83.493	83.492,54
b.	Komoditi Kelapa Sawit (Ton)	193.226,22	212.549	233.804	257.184	282.903	311.193	342.312	342.312,04
c.	Komoditi Lada (Ton)	506,86	558	613	675	742	816	898	897,93
8.	Layanan Bimbingan dan Penyuluhan kepada Kelompok Tani (Kec.Des, Kelompok)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Nilai tukar petani (Point)	96,75	96,75	97,25	98,40	98,65	99,25	99,50	102,95

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategi pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang pada dasarnya untuk dijadikan acuan pembangunan pertanian selama lima tahun kedepan (Tahun 2017 – 2021), dimana pembangunan pertanian tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara utuh dan merata, mengembangkan sarana dan prasarana pertanian , mewujudkan swasembada pangan dan daging sapi, mengembangkan IPTEK yang spesifik lokasi dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dan memacu kemandirian, serta meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal.

Pembangunan pertanian (pangan, ternak dan perkebunan) di Kabupaten Sintang masih dapat terus ditingkatkan, mengingat masih besarnya peluang dilihat dari potensi pertanian (pangan, ternak dan perkebunan) yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Walaupun masih banyak hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian (pangan, ternak dan perkebunan), tetapi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan memperbaiki kelemahan – kelemahan untuk dijadikan dan diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan pertanian (pangan, ternak dan perkebunan) di Kabupaten Sintang.